

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SERANG 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SERANG**

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SERANG 2023

<https://serangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SERANG**

# **Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS Kota Serang 2023**

**ISBN:** -

**Nomor Publikasi:** 36730.2318

**Katalog:** 4102004.3673

**Ukuran Buku:** 17,6 cm x 25 cm

**Jumlah Halaman:** xi + 107 halaman

**Naskah:**

Aprias Eko Wulandari

**Penyunting:**

Faizin

**Desain Cover:**

Mia Amalia

**Diterbitkan oleh:**

© BPS Kota Serang

**Dicetak oleh:**

Suhud Sentra Utama

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

# Kata Pengantar

Publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Serang 2023**, merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data dan indikator mengenai perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. Data dan indikator yang digunakan bersumber dari hasil survei BPS, yang meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, serta data dari instansi lain di luar BPS.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya sudah tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan tingkat kesejahteraan dikaji menurut tujuh aspek, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, serta kemiskinan dan ketimpangan.

Diharapkan, publikasi ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Serang. Akhirnya, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini. Kritik dan saran, sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang.

Serang, Desember 2023

Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Serang



Faizin S.Si.,ME

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	xi
Bab I. Kependudukan .....	3
Bab II. Kesehatan dan Gizi .....	21
Bab III. Pendidikan .....	35
Bab IV. Ketenagakerjaan .....	45
Bab V. Taraf dan Pola Konsumsi .....	57
Bab VI. Perumahan .....	69
Bab VII. Kemiskinan dan Ketimpangan .....	83
Daftar Pustaka .....	97
Lampiran .....	101

# Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan	10
Tabel 1.2.	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten Tahun 2023	12
Tabel 1.3.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2019 - 2023	13
Tabel 1.4.	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2019-2023	15
Tabel 1.5.	Jumlah dan Persentase Peserta KB Aktif Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan di Kota Serang Tahun 2020-2021	17
Tabel 2.1.	Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023 (Persen)	23
Tabel 2.2.	Perkembangan Umur Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2020 – 2023	24
Tabel 2.3.	Persentase Balita (Usia 0-59 Bulan) yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin Tahun 2023	31
Tabel 3.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 (Persen)	36
Tabel 3.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2020-2023	39

Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Agustus 2021-2023 (Persen)	47
Tabel 4.2	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Agustus 2022-2023	50
Tabel 4.3	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Agustus 2022-2023	52
Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran Maret 2021-2023	60
Tabel 5.2	Komposisi Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran Maret 2021-2023 (Persen)	61
Tabel 5.3	Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari Maret 2021-2023	64
Tabel 6.1	Persentase Rumah tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2021-2023	77
Tabel 6.2	Persentase Rumah tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2021 - 2023	78
Tabel 7.1	Garis Kemiskinan di Kota Serang 2019-2023 (Rupiah per Kapita Sebulan)	85
Tabel 7.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kota Serang Maret 2019-2023	87
Tabel 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Kota Serang 2019-2023	88
Tabel 7.4	Distribusi Persentase Pengeluaran Penduduk Kriteria Bank Dunia dan Indeks Gini, Maret 2019-2023	91
Tabel 7.5	Pengeluaran Perkapita Perbulan dan Persentase Penduduk Kota Serang Tahun 2023	93

# Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Serang Tahun 2017-2023	5
Gambar 1.2.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2017-2023	6
Gambar 1.3.	Piramida Penduduk Kota Serang Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	9
Gambar 2.1.	Persentase Angka Kesakitan Kota Serang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	26
Gambar 2.2.	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan Tahun 2023	28
Gambar 2.3.	Persentase Penduduk Rawat Jalan Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Tahun 2023	28
Gambar 2.4.	Persentase Anak Berusia 2 Tahun yang Pernah Disusui Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	30
Gambar 3.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah Tahun 2022-2023 (Persen)	37
Gambar 3.2.	Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023	41
Gambar 4.1.	TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2022-2023 (Persen)	48
Gambar 5.1.	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan dan Proporsi Pengeluaran Untuk Konsumsi Makanan per Kapita Maret 2020-2023	58
Gambar 5.2.	Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari Maret 2019-Maret 2023	63

Gambar 6.1.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Lantai Terluas Bukan Tanah/Lainnya Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2021-2023	71
Gambar 6.2.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Atap Terluas Bukan dari Ijuk/Lainnya Tahun 2021 - 2023	72
Gambar 6.3.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Dinding Layak Tahun 2021-2023	73
Gambar 6.4.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah menurut Luas Lantai per Kapita Tahun 2021-2023	75
Gambar 7.1.	Garis Kemiskinan di Kota Serang 2019 - 2023 (Ribu rupiah)	86

<https://serangkota.bps.go.id>

Bab

1

# KEPENDUDUKAN



# I Kependudukan

Penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut berbagai literatur ekonomi kependudukan, jumlah penduduk yang bertambah banyak akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah ini akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan sekaligus meningkatkan jumlah produksi. Selain itu, akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, kemahiran penduduk menjadi semakin berkembang sehingga produktivitasnya akan meningkat. Akibat produktivitas yang meningkat, jumlah produksi akan tumbuh lebih cepat dari penambahan tenaga kerja.

Dampak positif lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi, bersumber dari penambahan luas pasar. Dimana, besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan dalam suatu perekonomian, salah satunya bergantung kepada jumlah penduduk. Apabila penduduk bertambah, dengan sendirinya luas pasar akan bertambah pula. Oleh karena itu, perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada penambahan dalam produksi dan tingkat kegiatan ekonomi.

Di sisi lain, jumlah penduduk yang besar memerlukan kebutuhan hidup yang besar pula. Bila terjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup, akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Misalnya, penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan resiko meningkatnya jumlah kematian penduduk. Ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi, mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak.

Masalah lain yang dapat muncul, adalah terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas yang dipicu oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia karena sarana pendidikan yang terbatas.

Selain jumlah penduduk yang besar, ketimpangan komposisi dan sebaran penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan, harus dipilah sedemikian rupa sehingga berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan wilayah secara keseluruhan. Dengan demikian, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

### **Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**

Hasil proyeksi penduduk yang dihitung menurut Sensus Penduduk 2020, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Serang pada tahun 2023 mencapai 723.794 orang meningkat 1,60 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 712.414 orang. Pada periode yang sama, Kota Serang menjadi kabupaten/kota dengan populasi terkecil kedua di Provinsi Banten, setelah Kota Cilegon.

Kendati jumlah penduduk Kota Serang terus mengalami peningkatan, laju pertumbuhan penduduk Kota Serang sejak berdiri pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami perlambatan (Gambar 1.1). Sebagai ibukota dari Provinsi Banten, laju pertumbuhan Kota Serang pada tahun 2023 sebesar 0,75 persen menduduki peringkat ke-4 dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Laju pertumbuhan penduduk secara teoritis dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni fertilitas, mortalitas dan migrasi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh masih tingginya tingkat kelahiran yang disebabkan besarnya

jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Untuk itu terus dilaksanakan upaya penurunan tingkat kelahiran melalui penundaan usia perkawinan dan mengajak PUS untuk berkeluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi yang lebih efektif. Perlambatan laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Serang, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah melalui Program Keluarga Berencana sejak tahun 1980 sudah berjalan efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Serang.

Meskipun demikian jumlah penduduk setiap tahun semakin meningkat, tentunya menimbulkan persoalan tersendiri bagi Kota Serang. Hal ini karena dalam proses perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan, akan semakin banyak lagi yang perlu dipertimbangkan.

Gambar 1.1.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk  
Kota Serang Tahun 2017-2023



Sumber : Proyeksi Penduduk Banten 2020-2035 (data diolah)

Perkembangan sektor jasa yang pesat di Kota Serang berdampak pula terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, rumah makan dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menuntut pemerintah kota untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana prasarana umum lainnya.

Gambar 1.2.

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Serang  
Tahun 2017-2023



Sumber : Proyeksi Penduduk Banten 2020-2035 (data diolah)

Selain jumlah dan pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) menjadi salah satu indikator kependudukan yang layak untuk dicermati. Berdasarkan Gambar 1.2, terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kota Serang terus mengalami penurunan, meskipun besarnya masih tetap di atas 100. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Serang pada tahun 2023 mencapai 104,33. Dengan kata lain, ada sekitar 104 orang penduduk laki-laki untuk setiap 100 orang penduduk perempuan.

Sementara itu turunnya rasio jenis kelamin ini menjadi penanda bahwa proporsi penduduk laki-laki dalam struktur penduduk Kota Serang telah mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya, kemungkinan adalah berkurangnya jumlah bayi laki-laki yang dilahirkan, seperti yang sebelumnya sudah terjadi di negara-negara maju.

Menurut para peneliti dari Universitas Exeter dan Universitas Oxford, gaya hidup modern dengan pola makan rendah kalori, dapat menjelaskan mengapa jumlah bayi laki-laki yang lahir di negara-negara maju menjadi berkurang. Hal ini karena tingginya kadar kalori yang dikonsumsi oleh wanita yang sedang berusaha untuk hamil, akan lebih meningkatkan peluang mereka dalam melahirkan anak laki-laki (BBC Indonesia, 2008).

Di sisi lain, menurunnya proporsi penduduk laki-laki, secara teori juga disebabkan oleh lebih banyaknya laki-laki yang meninggal setiap tahun, dibandingkan perempuan. Penurunannya ini sejalan dengan meningkatnya kelompok umur penduduk. Oleh karena itu, semakin tua usia kelompok umur, proporsi penduduk laki-laki akan semakin berkurang. Bahkan, pada usia dewasa (40 – 54 tahun), usia tua (55 – 64 tahun) dan usia lanjut (65 tahun ke atas), jumlah perempuan cenderung lebih banyak daripada laki-laki.

Dalam banyak literatur juga ditemukan bahwa naik atau turunnya proporsi penduduk laki-laki atau rasio jenis kelamin, berkaitan erat dengan fenomena migrasi. Dalam arti, daerah tujuan migrasi yang memerlukan banyak tenaga kerja laki-laki, seperti di daerah pertambangan, rasio jenis kelaminnya akan meningkat dan dengan besaran tetap di atas 100. Sementara daerah yang ditinggalkan pergi merantau oleh para laki-laki, rasio jenis kelaminnya akan menurun dan bahkan cenderung berada di bawah 100.

Selain rasio jenis kelamin, struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digambarkan secara visual pada sebuah grafik yang disebut piramida penduduk. Proporsi dari penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida tersebut dapat diperoleh gambaran yang

lebih jelas mengenai sifat karakteristik suatu penduduk.

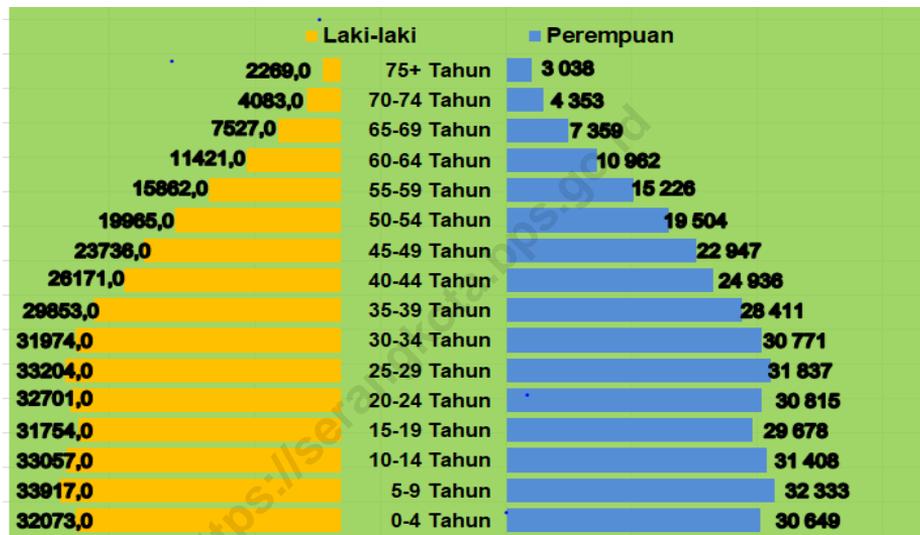
Selain itu, bentuk piramida secara keseluruhan dapat memberikan keterangan tentang keadaan dan perubahan tiap kelompok umur pada masa lalu dan memperkirakan keadaan penduduk pada masa yang akan datang. Terdapat tiga bentuk piramida penduduk, yaitu *Pertama*. Piramida Ekspansif, jika sebagian besar penduduk berusia muda. Dengan ciri melebar pada bagian bawah dan semakin meruncing pada bagian atas. Terdapat pada negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat akibat dari masih tingginya angka kelahiran dan sudah menurunnya tingkat kematian (negara berkembang). *Kedua*. Piramida Konstruktif, jika penduduk yang berada pada kelompok termuda jumlahnya sedikit. Ciri-ciri piramida yaitu mengecil pada kelompok umur muda, melebar pada kelompok umur dewasa, dan mengecil kembali pada kelompok umur tua. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan yang cepat terhadap tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian penduduk. Bentuk piramida seperti ini terdapat di negara-negara maju. *Ketiga*. Piramida Stasioner, jika jumlah penduduk pada tiap kelompok umur (muda, dewasa, dan tua) relatif seimbang. Ciri-ciri piramida yaitu bentuk yang relatif sama atau rata pada tiap kelompok umur. Bentuk piramida semacam ini pada umumnya terdapat di negara-negara Eropa yang telah lama maju serta mempunyai tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang rendah.

Gambar 1.3. menunjukkan perkembangan piramida penduduk Kota Serang pada tahun 2023 berbentuk piramida ekspansif. Hal ini tampak dari sebagian besar penduduk terdapat pada kelompok usia muda atau bagian bawah piramida melebar dan semakin meruncing pada bagian atas. Bagian bawah melebar menunjukkan terjadinya kelahiran yang tinggi pada masa sebelum tahun 2023. Sedangkan bagian atas semakin mengecil menunjukkan tingkat kelahiran besar di waktu yang lalu. Dasar piramida yang lebih besar dan sama dengan badan gemuk menunjukkan adanya perbaikan dari sisi kesehatan. Dimana terjadi kelahiran yang cukup besar pada beberapa waktu

yang lalu, tetapi tingkat kematian bayi menurun sehingga jumlah bayi yang lahir dan tetap hidup mencapai usia dewasa lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Implikasinya, penduduk yang masuk pada usia kerja semakin besar

Gambar 1.3.

Piramida Penduduk Kota Serang  
Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023



### Angka Beban Ketergantungan dan Bonus Demografi

Angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator kependudukan yang penting, karena dapat menggambarkan dampak dari keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang. Semakin besar angkanya, menunjukkan semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun), dalam membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas). Sebaliknya bila semakin kecil, beban yang ditanggung menjadi lebih ringan.

Komposisi penduduk Kota Serang terlihat didominasi oleh penduduk usia

produktif (15-64 tahun). Bahkan, persentasenya juga terus meningkat hingga menjadi 69,32 persen pada tahun 2023 (Tabel 1.1). Dengan demikian, Kota Serang memiliki penduduk usia produktif yang cukup banyak dan sangat potensial untuk digunakan sebagai modal dasar dalam membangun daerah.

Persentase penduduk usia 0-14 tahun dapat dikatakan cukup tinggi dan terus menurun. Begitu juga persentase penduduk usia 65 tahun ke atas terus mengalami peningkatan, hal tersebut menjadi salah satu bukti adanya perbaikan dalam bidang kesehatan, sehingga penduduk dapat hidup lebih lama.

Tabel 1.1.  
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan  
Angka Beban Ketergantungan  
Tahun 2017-2023

Tahun	Komposisi Penduduk (Persen)			Angka Beban Ketergantungan
	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun ke Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	28,48	68,2	3,31	46,62
2018	28,15	68,34	3,51	46,33
2019	27,83	68,44	3,73	46,11
2020	27,93	68,85	3,21	45,23
2021	27,51	69,03	3,45	44,85
2022	27,11	69,19	3,70	44,54
2023	26,73	69,32	3,96	44,26

Sumber : Proyeksi Penduduk Interim 2020 - 2023

Adanya perubahan komposisi penduduk, jelas sangat mempengaruhi besarnya angka beban ketergantungan. Pada tahun 2017, angka beban ketergantungan Kota Serang masih sebesar 46,62. Berarti, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung antara 47 orang penduduk usia tidak produktif. Sementara pada tahun 2023, beban yang ditanggung sedikit

mengalami penurunan, sehingga yang ditanggung maksimal hanya 44,26 orang penduduk usia tidak produktif.

Melihat besaran angka beban ketergantungan yang kurang dari 50 ini, dapat dikatakan bahwa Kota Serang sudah mengalami bonus demografi (*demographic dividend*). Bahkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk, bonus demografi sudah diraih sejak tahun 2010. Bonus demografi tersebut juga masih akan dinikmati, setidaknya hingga tahun 2035 (BPS, 2013a).

Bonus demografi adalah suatu fenomena, dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan. Hal ini karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi penduduk usia muda sudah semakin kecil dan proporsi penduduk usia lanjut masih belum banyak. Bonus demografi mulai dinikmati bila angka beban ketergantungan terus mengalami penurunan hingga menjadi di bawah 50.

Walaupun sudah lama meraihnya, namun bonus demografi belum tentu bermanfaat bagi Kota Serang. Untuk benar-benar bisa menikmatinya, kualitas sumber daya manusia Kota Serang harus terus-menerus ditingkatkan. Peningkatan sumber daya manusia Kota Serang bisa dimulai dengan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas pendidikan, melakukan pengendalian jumlah penduduk dan kebijakan ekonomi demi mendukung terwujudnya fleksibilitas tenaga kerja.

Jika kualitas sumber daya manusia tidak diimbangi dengan standar kualifikasi yang diperlukan maka ketika memasuki masa bonus demografi jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan tidak dapat terkendali. Sebagai akibatnya sumber pendapatan masyarakat menjadi berkurang, kemiskinan tidak terelakkan yang akhirnya berdampak buruk terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

### Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Selain pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi salah satu masalah kependudukan. Komposisi penduduk Kota Serang sebesar 5,88 persen dari jumlah penduduk Provinsi Banten. Komposisi tertinggi yaitu Kabupaten Tangerang, mencapai 27,32 persen dari penduduk provinsi Banten.

Tabel 1.2.

Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten/Kota  
Provinsi Banten Tahun 2023 (Ribu)

Kabupaten/Kota	Penduduk	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Kabupaten Pandeglang	1.312,77	10,66
2. Kabupaten Lebak	1.433,70	11,65
3. Kabupaten Tangerang	3.362,61	27,32
4. Kabupaten Serang	1.682,13	13,67
5. Kota Tangerang	1.950,58	15,85
6. Kota Cilegon	450,51	3,66
7. Kota Serang	723,79	5,88
8. Kota Tangerang Selatan	1.391,65	11,31
<b>Provinsi Banten</b>	<b>12.307,73</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Interim 2020 - 2023

Ketidakmerataan sebaran penduduk ini, pada awalnya disebabkan oleh adanya aglomerasi industri pengolahan yang mendorong munculnya daerah-

daerah perkotaan baru. Berdasarkan data yang ada, aglomerasi industri pengolahan tersebut terjadi pada hampir seluruh kabupaten/kota di Banten, termasuk Kota Serang dan terkecuali Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Tabel 1.3.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Serang  
Tahun 2019 - 2023

Tahun	Penduduk	
	Jumlah	Kepadatan
(1)	(2)	(3)
2019	687.359	2.582,31
2020	689.412	2.590,02
2021	700.946	2.633,35
2022	712.414	2.676,44
2023	723.794	2.719,19

Sumber : *Proyeksi Penduduk Interim 2020 - 2023*

Jumlah penduduk Kota Serang pada tahun 2023 sebesar 723.794 jiwa dengan luas Kota Serang sebesar 266,18 Km<sup>2</sup>, itu artinya untuk setiap kilometer persegi wilayah Kota Serang dihuni oleh sekitar 2.719 penduduk. Kepadatan penduduk tersebut tentunya semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan kompleksitas masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh dan permasalahan sosial lainnya. Kepadatan penduduk cenderung terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu yang memiliki peluang tinggi terhadap mata pencaharian. Agar persebaran penduduk tidak

terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu maka diperlukan pembangunan secara adil dan merata.

### Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Tingkat fertilitas tidak terlepas dari usia perkawinan pertama, khususnya bagi penduduk perempuan. Usia perkawinan pertama diartikan sebagai umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Hubungan antara usia kawin pertama dengan fertilitas adalah negatif. Semakin dini usia perkawinan, semakin panjang rentang masa reproduksi, sehingga memperbesar peluang untuk melahirkan anak dengan jumlah yang lebih banyak lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan arus informasi, masyarakat semakin paham bahwa selain membutuhkan kestabilan mental dari kedua pasangan, akibat dari perkawinan usia muda adalah umur reproduksi semakin panjang, kesempatan memperoleh anak semakin besar yang pada akhirnya akan meningkat angka kelahiran.

Perkawinan pada usia dini marak terjadi, karena faktor rendahnya tingkat pendidikan antar kedua pasangan, tuntutan ekonomi, sistem nilai budaya, pernikahan yang sudah diatur atau perjodohan, dan bahkan seks bebas.

Perkawinan pada usia dini akan meningkatkan resiko kematian bagi anak yang dilahirkan serta dapat menurunkan kesehatan reproduksi bagi ibu yang melahirkannya. Beban ekonomi yang muncul, juga semakin bertambah berat. Selain itu, akan meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian, dan bahkan bunuh diri. Oleh karena itu, perkawinan usia dini lebih banyak merugikan, terutama bagi perempuan dan anak yang dilahirkannya.

Terkait usia perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan bila pihak laki-laki dan perempuan sama-sama sudah berumur 19 tahun. Namun, undang-undang ini ternyata masih membuka peluang bagi terjadinya pernikahan dengan usia yang lebih dini lagi. Caranya adalah dengan meminta dispensasi kepada pengadilan, jika usia calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia yang telah ditetapkan.

Adapun BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merekomendasikan batas minimal usia perkawinan, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Alasannya, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita serta 25-30 tahun bagi laki-laki. Rekomendasi ini ditujukan demi kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga tercipta hubungan yang berkualitas (Putri, 2017).

Tabel 1.4.

Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2020 - 2023

Kelompok Umur	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤19	28,68	37,52	37,13	36,13
19+	71,32	62,48	62,87	63,87

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020 - 2023

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kebanyakan perempuan di Kota Serang melakukan perkawinan pertama pada usia ideal sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan bila pihak laki-laki dan perempuan sama-sama sudah berumur 19 tahun. Persentase perempuan yang melakukan perkawinan di atas 19 tahun pada tahun 2023 mencapai 63,87 persen. Hanya saja, masih ditemukan perempuan berusia kurang dari 19 tahun yang sudah melakukan perkawinan pertama pada tahun 2023 yaitu sebesar 36,13 persen, akan tetapi angkanya menurun bila di banding tahun 2022 sebesar 37,13 persen.

### **Penggunaan Alat/Cara KB**

Penurunan tingkat fertilitas tidak terlepas dari peranan pemerintah. Salah satunya melalui program Keluarga Berencana (KB), yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi kelahiran anak dan angka kematian ibu. Program KB ini dilaksanakan dengan menggunakan alat kontrasepsi atau alat KB, yang beragam jenis dan macamnya.

Jumlah dan peserta aktif KB di Kota Serang pada tahun 2022-2023 terus mengalami peningkatan. Banyak ragam atau jenis alat/cara KB, pasangan usia subur bebas memilih alat/cara KB yang diinginkan dan dirasakan nyaman bagi diri dan pasangannya. Namun, yang paling banyak digunakan oleh akseptor KB di Kota Serang pada 2023 adalah Suntikan KB sebesar 64,94 persen, naik dibandingkan 2022 sebesar 59,51 persen.

Suntikan KB merupakan salah satu alat/cara KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Tingkat efektivitasnya menurut berbagai penelitian lebih rendah dibandingkan metode MKJP lainnya, yakni IUD dan Implant. Suntikan KB banyak dipilih karena dirasakan cukup efektif, praktis dan harganya lebih murah. Selain itu, ada ketakutan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh akseptor KB bila menggunakan IUD atau Implant.

Tabel 1.5.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2023

Alat/Cara Kontrasepsi	2022	2023
	Jumlah Persentase	Jumlah Persentase
(1)	(2)	(3)
MOW/ Tubektomi	1,65	2,23
MOP/ Vasektomi	0,30	0,68
AKDR/ IUD/ Spiral	7,61	7,71
Suntikan KB	59,51	64,94
Susuk KB/ Norplan/ Implanon/ Alwalit	5,75	11,75
Pil KB	22,56	11,49
Metode Menyusui Alami	2,62	1,20
Total	100,00	100,00

Sumber : BPS-Kota Serang dalam Angka 2022-2023

Sementara itu Pil KB menjadi salah satu alat/cara KB metode kontrasepsi jangka pendek (Non MKJP). Tingkat efektivitasnya memang lebih rendah dari alat KB metode MKJP, karena menuntut adanya kedisiplinan dari akseptor KB. Pil KB banyak dipilih karena penggunaannya lebih mudah dan praktis dibandingkan alat KB metode MKJP. Selain itu, harganya jelas lebih murah dan juga lebih nyaman digunakan daripada alat KB Non MKJP lain, yaitu Kondom Pria/Karet KB dan Intravag/Tisu/Kondom Wanita.

Untuk menjamin keberhasilan program KB, alat kontrasepsi yang lebih tepat digunakan adalah IUD dan Implant. Sayangnya persentase pengguna kedua

alat KB tersebut pada tahun 2023 masih sangat rendah, yaitu masing-masing hanya 7,71 persen dan 11,75 persen dari seluruh Akspetor KB. Oleh karena itu, BKBBN harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan cakupan penggunaan IUD dan Implant.

<https://serangkota.bps.go.id>

# KESEHATAN & GIZI





## Kesehatan dan Gizi

Derajat atau tingkat kesehatan masyarakat merupakan indikator penting dalam menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi wilayah tersebut, khususnya dalam meningkatkan produktivitas penduduk.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Serang telah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan demi terwujudnya masyarakat Kota Serang Sehat Mandiri. Dalam hal ini, derajat kesehatan masyarakat akan ditingkatkan melalui program peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan kesadaran individu keluarga serta masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri serta mewujudkan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sasaran dan tujuan dari berbagai program bidang kesehatan di atas adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan umur harapan hidup.

Adapun upaya yang sudah dilakukan Pemerintah melalui program-program bidang kesehatan, antara lain adalah menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara lebih merata, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan dan peningkatan status rumah sakit daerah, meningkatkan cakupan dan mutu

puskesmas/pustu, polindes dan posyandu, serta meningkatkan cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

### Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Menurut WHO, sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang merupakan satu kesatuan, bukan hanya terbebas dari penyakit maupun cacat. Sejalan dengan definisi tersebut, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan warga negara, sehingga pemenuhannya menjadi tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat atau penduduk yang setinggi-tingginya.

Salah satu indikator derajat kesehatan penduduk adalah status kesehatan. Status kesehatan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Status kesehatan penduduk menjadi satu dari beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator angka kesakitan.

Angka kesakitan (*morbidity rate*) adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, hingga mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil Susenas 2023 seperti yang disajikan pada Tabel 2.1, angka kesakitan penduduk Kota Serang mencapai 15,62 persen, atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 16,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Serang semakin

sadar akan pola hidup sehat setelah pandemic covid-19 yang melanda di tahun 2020.

Tabel 2.1.

Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
Tahun 2020-2023 (Persen)

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	16,99	10,79	14,96	15,13
Perempuan	18,77	13,77	18,4	16,14
Total	17,86	12,25	16,64	15,62

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2023

Dari sisi besaran, angka kesakitan perempuan selalu lebih besar dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023 angka kesakitan perempuan sebesar 16,14 persen, lebih tinggi dibandingkan angka kesakitan laki-laki yang mencapai 15,13 persen. Berdasarkan pendapat para ahli bahwa sekarang banyak bukti yang menunjukkan perempuan lebih sensitif terhadap rasa sakit dan memiliki toleransi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan membicarakan rasa sakit lebih terbuka, sementara laki-laki mungkin akan meremehkannya.

Sementara itu umur harapan hidup yang merupakan indikator utama derajat kesehatan masyarakat, adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Secara teori, semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin buruk kesehatannya maka umur kehidupan orang tersebut akan semakin pendek.

Ada keterkaitan antara umur harapan hidup dan mortalitas. Saat mortalitas rendah, umur harapan hidup akan meningkat. Demikian pula sebaliknya. Mortalitas sendiri adalah ukuran jumlah kematian yang terjadi pada suatu populasi. Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya mortalitas ini, antara lain yaitu penyakit, tingkat kriminalitas yang tinggi dan sanitasi lingkungan yang buruk.

Tabel 2.2.

Perkembangan Umur Harapan Hidup  
Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2020 - 2023

Tahun	Umur Harapan Hidup
(1)	(2)
2020	74,43
2021	74,54
2022	74,84
2023	75,13

Sumber : Proyeksi Penduduk Banten 2020-2023

Umur harapan hidup (UHH) berdasarkan hasil LF SP2020 penduduk Kota Serang berangsur meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 umur harapan hidup Kota Serang telah mencapai 75,13 tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 74,84 tahun. Angka tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Banten yang mencapai 74,77 tahun. Betapapun juga, kondisi yang demikian menjadi penanda bagi meningkatnya derajat kesehatan, sekaligus tingkat kesejahteraan masyarakat.

Bila dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa perempuan memiliki UHH yang lebih tinggi. Berarti, secara rata-rata

perempuan hidup lebih lama dari laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian berbagai pakar terungkap bahwa perempuan lebih sehat dibandingkan laki-laki. Selain faktor hormon, sistem kekebalan yang lebih aktif dan lebih kebal terhadap infeksi, kesehatan yang lebih unggul juga dikarenakan pola hidup perempuan lebih sehat dibandingkan laki-laki. (<https://homecare24.id>)

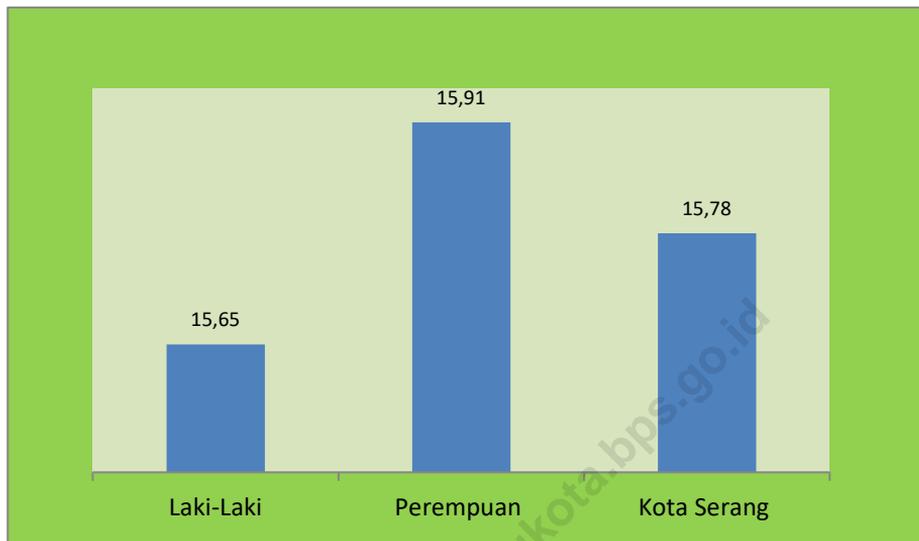
Selain itu, perempuan lebih kuat menghadapi penyakit jantung. Sementara kecenderungan perkembangan penyakit jantung dan risiko meninggal karena penyakit ini, paling cepat pada usia 30-an dan 40-an dimiliki oleh laki-laki. Adapun untuk perempuan, perkembangannya membutuhkan waktu 10 tahun lebih lama.

Oleh karena itu tingginya umur harapan hidup perempuan, sudah seharusnya didukung oleh rendahnya tingkat mortalitas penduduk perempuan. Adapun relatif lebih rendahnya umur harapan hidup laki-laki, harus ditopang oleh tingkat mortalitas yang lebih tinggi dari laki-laki.

### **Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan**

Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi hal yang wajib dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Apalagi jika melihat angka kesakitan penduduk Kota Serang pada tahun 2023 yang masih tergolong tinggi, yakni mencapai 15,78 persen (Gambar 2.1). Tingkat kesakitan atau morbiditas sendiri dihitung dari jumlah penduduk yang mengalami keluhan (sakit) hingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Adapun keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menjadi penyebab terganggunya aktivitas atau kegiatan sehari-hari.

Gambar 2.1  
Persentase Angka Kesakitan di Kota Serang  
Berdasarkan Jenis kelamin Tahun 2023



Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023 (data diolah)

Sayangnya, meskipun mengalami keluhan kesehatan, tidak semua penduduk secara serta merta berobat pada fasilitas kesehatan maupun tempat berobat lainnya. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan.

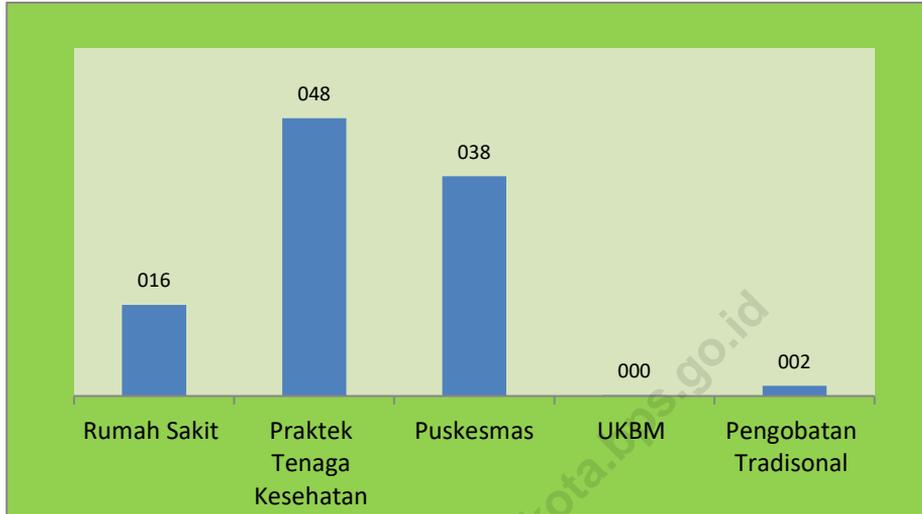
Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya persentase penduduk yang sakit melakukan berobat jalan, dalam hal ini memanfaatkan fasilitas dan tenaga kesehatan. Beberapa di antaranya adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, kondisi sosial-ekonomi penduduk atau kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, dan jenis pelayanan kesehatan serta preferensi penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan tersebut. Namun pada negara berkembang, kemiskinan merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan (Handayani, 2020). Adapun banyak yang memilih cara praktis untuk mengobati sendiri dengan membeli

obat warung, vitamin dan meminum obat herbal. Pada tahun 2023, angka kesakitan menurun bila dibanding tahun 2022 mencapai 16,64 persen diiringi dengan peningkatan yang melakukan berobat jalan. Sementara pada tahun 2022, kecemasan masyarakat terhadap terpaparnya virus covid semakin menurun sehingga meningkatkan kembali kesadaran masyarakat untuk melakukan berobat jalan pada fasilitas kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat ( PP Nomor 47 Tahun 2016). Apabila diamati menurut fasilitas kesehatan, pada tahun 2023 sebagian besar penduduk yang mengalami keluhan kesehatan ternyata lebih memilih praktek Dokter/bidan/klinik/praktek dokter bersama sebagai tempat berobat jalan mencapai 47,85 persen. Selain itu, puskesmas masih menjadi favorit masyarakat dalam melakukan berobat jalan, yaitu mencapai 37,83 persen, sedangkan yang terendah pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan adalah di UKBM (upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat) seperti posyandu, polindes, puskesdas sebesar 0,16 persen. (Gambar 2.2)

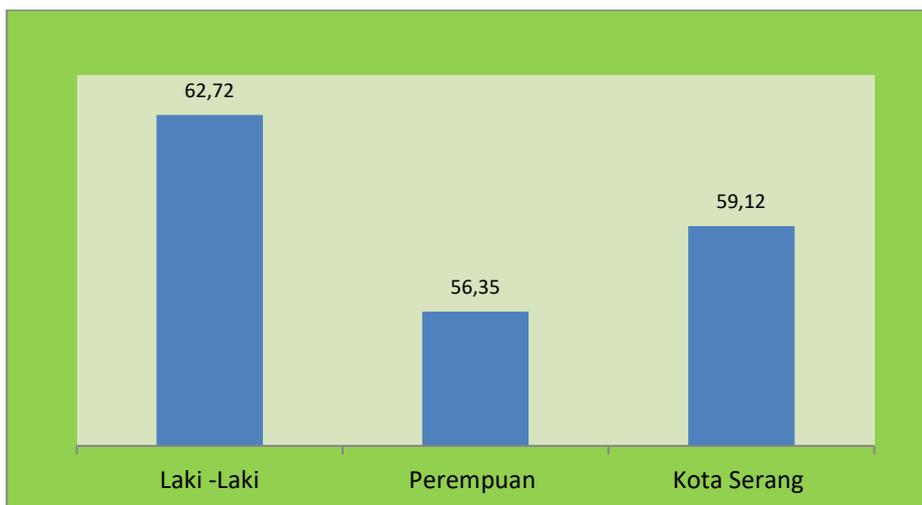
Tingginya persentase puskesmas/pustu sebagai faskes yang digunakan oleh masyarakat untuk berobat jalan salah satunya, disebabkan karena puskesmas/pustu merupakan faskes tingkat I yang digunakan sebagian besar masyarakat sebagai rujukan pengguna BPJS kesehatan hampir di seluruh daerah tempat tinggal, tidak terkecuali di Kota Serang. Tahun 2023 persentase penduduk berobat jalan dengan menggunakan jaminan kesehatan sebesar 59,12 persen. Sedangkan menurut jenis kelamin, Laki-laki lebih banyak menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebesar 62,72 persen di banding perempuan sebesar 56,35 persen. (Gambar 2.3)

Gambar 2.2  
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan  
Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan Tahun 2023



Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Tahun 2023

Gambar 2.3  
Persentase Penduduk Rawat Jalan  
Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan  
Tahun 2023



### Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

ASI merupakan makanan pertama bayi yang paling berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat jangka panjang yang sangat baik, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, serta mengandung protein dan gizi yang berkualitas tinggi. ASI juga mengandung zat antibodi yang sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare, serta penyakit infeksi dan penyakit lainnya.

Demikian pentingnya pemberian ASI bagi bayi, sehingga *World Health Organizations* (WHO), merekomendasikan kegiatan berupa proses inisiasi menyusui dini. Kegiatan ini lebih dikenal sebagai Program Inisiasi Menyusui Dini (PIMD), yang dijalankan selama satu jam pertama kehidupan awal bayi. Proses inisiasi tersebut dilakukan dengan cara menempatkan bayi di dada ibunya, segera setelah bayi keluar dari jalan lahir. Bayi ini kemudian akan secara alami, mencari puting ibunya untuk menghisap ASI.

Banyak sekali manfaat yang didapat dari proses IMD ini. Di antaranya adalah memberikan peluang kepada bayi untuk mendapatkan kolostrum, membuat bayi menjadi tenang, mengurangi angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh bayi, lebih menstabilkan napas bayi, dan menunjang keberhasilan pemberian ASI eksklusif, serta membantu ibu untuk pulih lebih cepat.

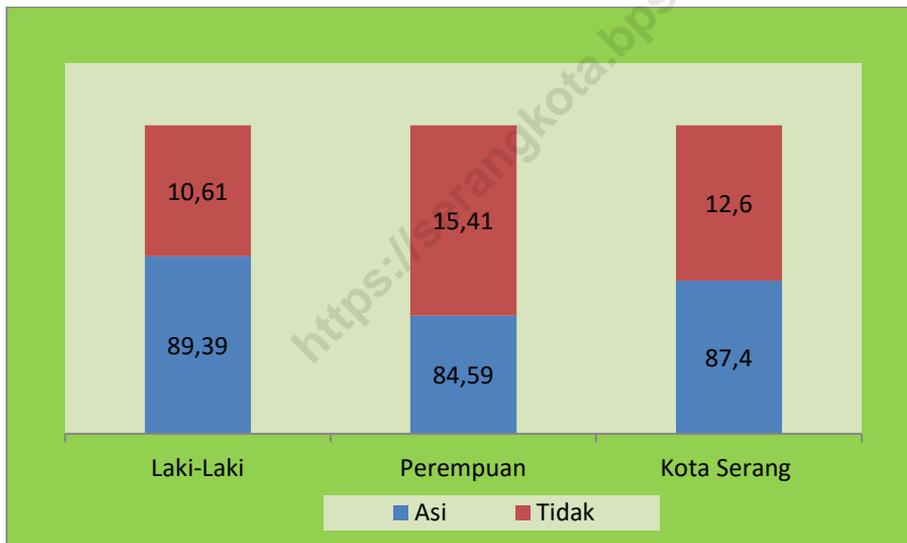
Disamping itu, bukti menunjukkan bahwa kulit bayi yang bersentuhan langsung dengan kulit ibunya, segera setelah lahir ke dunia, dapat membangun keintiman yang lebih dalam dengan sang ibu. Proses ini juga membantu bayi tetap merasa hangat setelah keluar dari rahim (Alodokter, 2018).

Selain PIMD, pemerintah juga menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke

depan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Setelah bayi berusia 6 bulan ke atas, baru dilanjutkan bersama makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun, agar diperoleh kekebalan yang lebih kuat.

Berdasarkan Gambar 2.4, diketahui bahwa anak berusia kurang dari 2 tahun di Kota Serang yang pernah disusui sebanyak 87,4 persen, anak laki-laki sebesar 89,39 persen dan anak perempuan sebesar 84,59 persen. Namun demikian, rata-rata lama disusui sebesar 10,25 bulan (10 bulan 25 hari).

Gambar 2.4  
Persentase Anak Berusia 2 Tahun yang Pernah Disusui  
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021

Selain ASI, imunisasi juga sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan dan daya tahan tubuh balita. Ada dua jenis imunisasi, yaitu imunisasi pasif dan aktif. Imunisasi pasif merupakan kekebalan bawaan yang diperoleh anak sejak lahir, sedangkan imunisasi aktif didapat dari pemberian vaksin kepada anak, melalui suntik atau tetes.

Terkait imunisasi aktif, hasil Susenas 2023 menunjukkan bahwa persentase balita di Kota Serang yang pernah melakukan imunisasi lengkap sebanyak 32,24 persen. Angka tersebut tentunya masih sangat rendah, tapi mengalami kenaikan dibanding tahun 2022, sebab untuk memperoleh kekebalan yang cukup, seorang anak harus mendapatkan imunisasi lengkap. Yang dimaksud dengan imunisasi lengkap adalah anak yang telah mendapatkan satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, tiga kali imunisasi polio dan satu kali imunisasi campak.

Tabel 2.3

Persentase Balita (Usia 0-59 Bulan) yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Jenis Imunisasi	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pernah Diimunisasi Lengkap	33,83	30,59	32,24
BCG	86,03	84,43	85,25
DPT	79,26	79,36	79,31
Polio	67,43	69,30	68,35
Campak/Morbili	61,69	61,96	61,82
Hepatitis B	66,02	64,97	65,51

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Serang 2023

Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat enggan melakukan imunisasi terhadap balita diantaranya adanya pro kontra masyarakat bahwa vaksin mengandung unsur haram yaitu mengandung *porcine* (babi), juga disebabkan pengetahuan para ibu terkait informasi yang beredar dimasyarakat dengan pemberitaan vaksin palsu yang membuat masyarakat

semakin takut dan tidak mau mengimunisasi anaknya (Mardiah Dwi,2017).

Pada tahun 2023 imunisasi BCG memiliki persentase paling tinggi dibandingkan jenis imunisasi lainnya yaitu sebesar 85,25 persen. Hal tersebut disebabkan karena imunisasi BCG diberikan pada saat segera setelah bayi lahir hingga paling lambat sebelum bayi berusia 3 bulan. Sehingga pemberian imunisasi BCG lebih terkontrol.

Sementara jenis imunisasi yang memiliki persentase paling rendah yaitu imunisasi campak/morbili yang hanya mencapai 61,82 persen. Sebelum melakukan imunisasi campak, bayi pada usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan diberikan imunisasi DPT dan akan berlanjut dengan pemberian imunisasi campak/morbili yang diberikan pada usia anak bayi 9 bulan. Selisih jarak 5 bulan yang cukup jauh dari pemberian imunisasi DPT menuju imunisasi campak pada usia 9 bulan, menjadi salah satu faktor membuat para ibu lalai untuk melakukan pemberian imunisasi campak.

<https://seranika.com/2023/01/01/>

# PENDIDIKAN





# Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal penting bagi seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk dirinya, serta dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, dengan pendidikan yang dimilikinya, seseorang diharapkan akan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan ini, maka pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan harus mencakup peningkatan pendidikan formal dan non formal. Pembangunan bidang pendidikan juga memerlukan peran serta aktif dari semua pihak, yang dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, semua program peningkatan pendidikan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Tujuan pembangunan bidang pendidikan sendiri adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan peningkatan mutu atau kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Meningkatnya akses terhadap pendidikan ini, antara lain ditandai oleh naiknya angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Implikasinya, ketersediaan sekolah atau kelas dan kemudahan untuk mengaksesnya, mutlak diperlukan bagi peningkatan angka partisipasi sekolah tersebut.

Sementara itu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan. Dalam hal ini, salah satu yang terpenting adalah ketersediaan tenaga pendidik yang mencukupi dan berkualitas. Ketersediaan tenaga pendidik

yang mencukupi dapat diketahui dari indikator rasio murid-guru dan rasio murid per kelas. Adapun tenaga pendidik berkualitas setidaknya dapat dilihat dari tingginya kualitas guru yang mengajar.

### Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan indikator bidang pendidikan, yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan pada berbagai kelompok usia sekolah. Pemerintah berharap APS semua kelompok usia sekolah, setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini karena peningkatannya itu menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang telah memperoleh layanan pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun dan usia 16-18 tahun pada tahun 2023 mengalami penurunan masing-masing mencapai 98,32 persen dan 63,45 persen. Usia 16-18 tahun merupakan kelompok usia yang setara dengan jenjang pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK). Berdasarkan data Susenas 2023, terlihat bahwa APS penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2023 telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 91,51 persen (Gambar 3.1). Kondisi yang demikian menjadi penanda bagi meningkatnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan menengah ke atas. Besar kemungkinan, peningkatan APS nya disebabkan oleh bertambahnya anggaran belanja pemerintah daerah terkait fungsi pendidikan. Dalam hal ini, karena Pemerintah Provinsi Banten telah menggratiskan SPP untuk siswa-siswa SMA/SMK dan Sederajat. Adapun biaya pendidikan SD sampai SMP, selama ini memang sudah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Betapapun juga, meskipun APS usia 16-18 tahun mengalami penurunan pada tahun 2023, namun besarnya masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Banten yang masing-masing mencapai 69,03 persen.

Implikasinya, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga berarti daya saing Kota Serang, dari sisi pendidikan berpotensi untuk menjadi lebih rendah dibanding 4 kota lainnya di Provinsi Banten.

Gambar 3.1.  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah  
Tahun 2022-2023 (Persen)



Sumber : Kesra Kota Serang 2023

Bila dicermati menurut jenis kelamin, terlihat bahwa APS laki-laki usia 7-12 tahun lebih tinggi dibandingkan APS perempuan. Nilai APS laki-laki usia 7-12 tahun mencapai 99,05 persen pada tahun 2023, sedangkan perempuan sebesar 97,53 persen. Begitu juga nilai APS untuk usia 13 – 15 tahun, 16 – 18 tahun dan 19 – 23 tahun lebih besar APS laki-laki dari pada perempuan. Meskipun demikian, selisih nilai APS laki-laki dan perempuan relatif kecil. Hal tersebut menjadi penanda perubahan cara pandang di tengah masyarakat, dimana anak perempuan sudah dianggap sama pentingnya dengan anak laki-laki. Akibatnya, peluang seorang anak untuk bersekolah tidak lagi ditentukan berdasarkan gender, melainkan semata karena faktor kemampuan.

Kesetaraan nilai APS berdasarkan gender ini dapat menjadi penanda bahwa di masa depan, kualitas SDM perempuan akan setara dengan laki-laki. Bila diskriminasi gender suatu saat sudah tidak ada lagi di dunia kerja, akan jauh lebih banyak lagi perempuan yang bekerja dibandingkan sekarang ini. Bahkan, ada kemungkinan proporsi perempuan yang bekerja melebihi laki-laki.

Tabel 3.1.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 (Persen)

Fasilitas Layanan Kesehatan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12 Tahun	99,05	97,53	98,32
13-15 Tahun	92,24	90,97	91,51
16-18 Tahun	63,68	63,19	63,45
19 – 23 Tahun	26,15	16,66	21,46

Sumber : Susenas Tahun 2023 (data diolah)

### Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dapat dicapai melalui pendidikan. Oleh karena itu, meningkatnya tingkat pendidikan penduduk dapat menjadi gambaran dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Tabel 3.2.  
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  
Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2021-2023

Ijazah/STTB Tertinggi	Laki-laki			Perempuan			Total		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/Belum Tamat SD	7,76	12,07	9,66	13,50	15,31	12,38	10,55	13,66	11,66
SD/MI	25,45	32,02	31,23	26,84	26,79	30,60	26,13	29,46	30,92
SMP/MTs	22,93	21,28	23,40	22,08	25,29	23,76	22,52	23,24	23,58
SMA ke atas	43,86	34,63	35,70	37,57	32,61	33,26	40,80	33,62	34,48

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021-2023

Tabel 3.2 menyajikan komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB yang dimiliki atau tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa persentase penduduk Kota Serang yang mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA ke Atas pada tahun 2023 telah mencapai 34,48 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Sementara pada tahun 2022 yang mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA ke atas mengalami penurunan di tahun 2021 mencapai 40,80 persen.

Bila diamati menurut jenis kelamin (Tabel 3.2), terlihat bahwa meningkatnya proporsi penduduk tamatan SMA ke atas, terjadi baik untuk laki-laki maupun perempuan. Setiap tahunnya persentase penduduk laki-laki tamatan SMA ke atas lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2023, persentase tamatan SMA ke atas laki-laki sebesar 35,70 persen sedangkan perempuan sebesar 33,26 persen.

Hal tersebut mencerminkan perbedaan kualitas SDM antara penduduk laki-laki dan perempuan. Terlihat bahwa kualitas SDM laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena memiliki proporsi lulusan SMA ke Atas yang lebih banyak.

### **Kualitas Layanan Pendidikan**

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan adalah pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan menjadi program utama pemerintah guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan pendidikan adalah rasio murid-guru. Rasio murid-guru merupakan jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu.

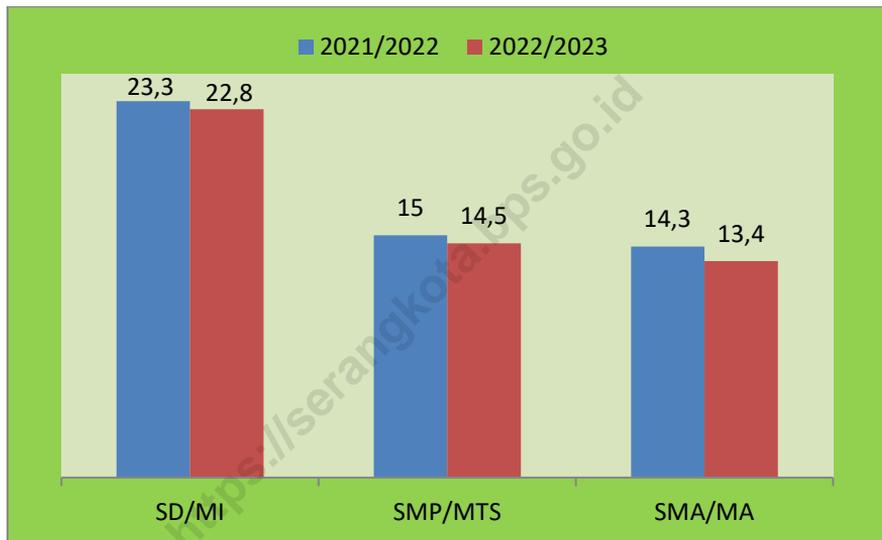
Semakin tinggi rasio murid-guru, akan semakin berkurang pengawasan/perhatian yang diberikan oleh guru terhadap murid, sehingga kualitas pengajaran cenderung semakin rendah. Hal ini karena, semakin banyak murid yang diajar oleh seorang guru, dapat mengurangi daya tangkap murid terhadap pelajaran yang diberikan. Dengan kata lain, akan mengurangi efektivitas proses belajar mengajar.

Berdasarkan data yang ada pada Gambar 3.2, terlihat bahwa selama tahun ajaran 2022/2023 telah terjadi penurunan rasio murid-guru di Kota Serang disemua jenjang pendidikan dibanding tahun ajaran 2021/2022. Pada jenjang pendidikan SD/MI, rasio murid-guru turun dari 23,27 menjadi 22,83, begitu juga untuk jenjang pendidikan SMP/MTS, rasio murid-guru menurun

dari 14,97 menjadi 14,53. Jenjang pendidikan SMA/MA dari 14,32 menjadi 13,35. Penurunan rasio murid-guru ini menjadi penanda adanya peningkatan dalam layanan pendidikan. Hal ini karena proses belajar mengajar pada berbagai jenjang pendidikan tersebut menjadi semakin efektif.

Gambar 3.2.

Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023



Sumber : Kota Serang dalam Angka 2023



Bab

4

# KETENAGAKERJAAN



# IV

## Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, cukup banyak permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan yang harus mendapat perhatian, diantisipasi dan diselesaikan oleh Pemerintah. Permasalahan tersebut antara lain adalah tingginya tingkat pengangguran, sedikitnya penciptaan lapangan kerja, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan sebagainya.

Bidang ketenagakerjaan adalah bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia, yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja.

Di sisi lain, data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan pemerintah, dalam rangka pembangunan nasional dan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Hal ini karena kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang tepat, sangat ditentukan oleh ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah merujuk kepada *The Labor Force Concept*, yang menjadi rekomendasi dari *International Labour Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja juga dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, yakni angkatan kerja dan bukan

angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu bekerja dan mencari pekerjaan (pengangguran). Sementara bukan angkatan kerja mencakup sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

### Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja, yang tergolong sebagai angkatan kerja. Dengan kata lain, TPAK mengukur keterlibatan aktif penduduk dalam kegiatan ekonomi. TPAK diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Berdasarkan Tabel 4.1, TPAK periode Agustus 2023 sebesar 68,44 persen, berarti ada sekitar 68 orang dari 100 penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi atau berperan serta dalam kegiatan ekonomi. Adapun sisanya, bukan merupakan angkatan kerja, yang dalam hal ini bisa jadi masih bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Dari sisi capaian, angka TPAK ini mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2022 sebesar 64,80 persen.

Diamati menurut jenis kelamin, angka TPAK Laki-laki di Kota Serang 2023 sebesar 84,56 persen, angka ini naik di bandingkan TPAK 2022 sebesar 79,65 persen. Sedangkan TPAK Perempuan 2023 sebesar 51,65 persen, naik di banding 2022 sebesar 49,25 persen. Meskipun demikian, TPAK perempuan masih tetap jauh lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki. Lebih rendahnya TPAK perempuan ini adalah sangat wajar, mengingat perempuan pada umumnya bukan tumpuan ekonomi keluarga. Terlebih lagi, setelah menikah kebanyakan dari mereka akan fokus mengurus rumah tangga, sehingga tidak aktif lagi dalam pasar kerja.

Tabel 4.1.  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Menurut Jenis Kelamin Agustus 2021-2023 (Persen)

Jenis Kelamin	TPAK			TPT		
	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
a. Laki-Laki	78,47	79,65	84,56	10,2	7,92	7,76
b. Perempuan	45,03	49,25	51,65	7,98	8,58	6,94
c. Laki-Laki dan Perempuan	62,16	64,80	68,44	9,41	8,17	7,45

Sumber : BPS Provinsi Banten

Dari TPAK dapat diketahui besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Namun untuk mengetahui seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja, hanya dapat dilihat melalui tingkat pengangguran terbuka (TPT). Bagian yang tidak terserap oleh pasar ini selanjutnya disebut sebagai penganggur, yang timbul karena suplai tenaga kerja jauh melebihi permintaannya.

Sementara penganggur atau pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang mempersiapkan usaha, atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Seiring dengan kenaikan TPAK, angka TPT total Kota Serang selama setahun terakhir ini mengalami penurunan (Tabel 4.1). TPT Kota Serang 2023 sebesar 7,45 persen turun 0,72 point di bandingkan 2022 sebesar 8,17 persen dan

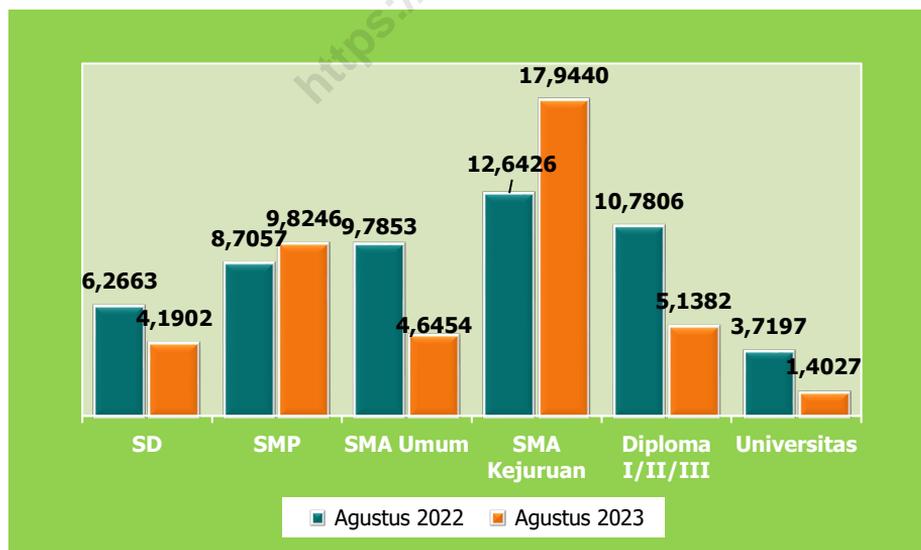
2021 sebesar 9,41 persen. Nilai TPT Laki-laki 2023 sebesar 7,76 persen turun di bandingkan 2022 sebesar 7,92 persen dan 2021 sebesar 10,2 persen. Sedangkan TPT Perempuan 2023 sebesar 6,94 persen mengalami peningkatan di banding 2022 sebesar 8,58 persen. TPT Kota Serang menduduki posisi ke 4 tertinggi di Provinsi Banten.

### Tingkat Pengangguran dan Pendidikan

Pendidikan yang tinggi menjadi jembatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan berdampak kepada tingginya harapan dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha, yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Gambar 4.1.

TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan  
Agustus 2022-2023 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Banten (data diolah)

Gambar 4.1, menyajikan TPT menurut tingkat pendidikan angkatan kerja, yang dapat memberikan gambaran mengenai penyerapan tenaga kerja pada masing-masing jenjang pendidikan. Terlihat bahwa pada Agustus 2023, angka pengangguran menurun untuk berbagai jenjang pendidikan angkatan kerja. Penurunan tertinggi terjadi pada angkatan kerja lulusan D I/II/III yang turun 5,64 point, sedangkan yang terendah untuk lulusan SD Sederajat yang turun sebesar 2,08 point. Kenaikan tingkat pengangguran di lihat dari jenjang pendidikan tertinggi adalah SMA Kejuruan naik 5,30 point, jenjang pendidikan SMP naik 1,12 point.

Diamati menurut besaran TPT nya, tingkat pengangguran terbuka penduduk berpendidikan SMP ke Bawah terlihat masih relatif rendah. Hal ini dapat terjadi karena angkatan kerja berpendidikan rendah memang bersedia untuk melakukan pekerjaan apa saja, termasuk bila dibayar dengan upah yang rendah sekalipun.

Sementara lulusan SMA Umum dan SMK, tingkat penganggurannya sangat tinggi. Hal ini dimungkinkan karena dengan keahlian yang terbatas, mereka akan kalah bersaing dengan angkatan kerja lulusan Diploma I/II/III dan Universitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, mereka juga harus bersaing dengan pencari kerja berpendidikan rendah, yang bersedia untuk melakukan pekerjaan apa saja.

Khusus lulusan SMK, sesungguhnya agak mengherankan bila memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi daripada lulusan SMA Umum. Hal ini karena, mereka benar-benar dipersiapkan untuk bekerja. Ada kemungkinan keahlian yang mereka miliki terlalu spesifik, sehingga lowongan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Kemungkinan lain adalah ada ketidakcocokan antara kurikulum muatan lokal yang diajarkan, dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada di Kota Serang pada khususnya.

Adapun lulusan universitas, tingkat penganggurannya paling rendah di antara semua angkatan kerja. Rendahnya angka TPT pencari kerja berpendidikan

tinggi ini, mengindikasikan bahwa mereka memang memiliki daya saing yang tinggi dalam pasar tenaga kerja. Hanya saja, mereka sepertinya memilih-milih pekerjaan, tentunya sesuai dengan tingkat pendidikan dan upah yang diharapkannya. Kondisi yang demikian setidaknya terlihat dari masih adanya penganggur di antara mereka.

### Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan Utama

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pekerjaan utama merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi suatu lapangan usaha dalam penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran lapangan usaha mana saja yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Dengan demikian, bila pemerintah ingin menerapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, dapat fokus kepada lapangan-lapangan usaha tertentu, sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Tabel 4.2.

Persentase Penduduk yang Bekerja  
Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Agustus 2022 - 2023

Lapangan Usaha	Agustus 2022	Agustus 2023
(1)	(2)	(3)
Pertanian	3,94	4,77
Manufaktur	26,16	25,27
Jasa - Jasa	69,90	69,96
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten

Berdasarkan Tabel 4.2, ada tiga lapangan usaha dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Serang. Ketiga lapangan usaha ini adalah lapangan usaha

Pertanian, Manufaktur dan Jasa-jasa. Dari ketiga lapangan usaha ini, hanya lapangan usaha manufaktur saja, yang penyerapan tenaga kerjanya mengalami penurunan.

Meskipun meningkat dibandingkan Agustus 2022, lapangan usaha Jasa-jasa ternyata masih mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, yaitu sebanyak 69,96 persen dari seluruh tenaga kerja yang ada di Kota Serang, disamping lapangan usaha pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 4,77 persen. Kondisi yang demikian menjadi sangat menarik untuk didalami, karena lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan hidup mayoritas penduduk di perdesaan karena upah pekerja lapangan usaha ini relatif lebih kecil dibandingkan lapangan usaha lainnya. Ada kemungkinan karena SDM nya kurang berkualitas, sehingga mereka tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam mengakses pekerjaan yang ada pada lapangan usaha lainnya. Patut diduga, penurunannya itu terjadi karena para pekerjanya lebih memilih untuk bekerja pada lapangan usaha lain, dengan upah upah yang lebih layak.

Selain berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja juga bisa diamati menurut status pekerjaan utamanya. Status pekerjaan utama ini, selanjutnya digunakan sebagai pendekatan untuk menyusun dua kelompok kegiatan ekonomi, yakni formal dan informal. Kegiatan ekonomi formal terdiri dari mereka yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Adapun sisanya, digolongkan ke dalam kegiatan informal.

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 4.3, terlihat bahwa mayoritas pekerja di Kota Serang pada tahun 2023 bekerja pada sektor ekonomi formal, kondisi ini sama dengan tahun 2022. Selain itu, persentasenya juga mengalami penurunan menjadi 51,26 persen pada Agustus 2023 dari sebelumnya 51,71 persen di 2022. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih menunjukkan bahwa status pekerjaan Formal masih

menjadi penguat sektor ekonomi di Kota Serang.

Melemahnya sektor ekonomi formal, banyak dipengaruhi oleh Penurunan persentase pekerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dari 49,37 persen menjadi 47,01 persen di 2023, sedangkan status berusaha di bantu buruh tetap/buruh dibayar naik dari 2,33 persen menjadi 4,25 persen. Menurunnya persentase pekerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (Tabel 4.3), Kemungkinan besar, hal ini disebabkan oleh melemahnya kegiatan atau kinerja usaha industri pengolahan, yang ditandai oleh beberapa pabrik pengolahan yang berpindah ke Jawa Tengah.

Tabel 4.3.

Persentase Penduduk yang Bekerja  
Menurut Status Pekerjaan Utama Agustus 2022-2023

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2022	Agustus 2023
(1)	(2)	(3)
1. Formal	51,71	51,26
a. Buruh/Karyawan/ Pegawai	49,37	47,01
b. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	2,33	4,25
2. Informal	48,29	48,74
a. Berusaha Sendiri	22,08	20,57
b. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Pekerja Keluarga/ Pekerja Tidak Dibayar	6,79	10,23
c. Pekerja Bebas Pertanian/Non Pertanian	11,31	5,93
d. Pekerja Keluarga/ Pekerja Tidak Dibayar	8,11	12,01

Sumber : BPS Provinsi Banten

Sebaliknya, sektor ekonomi Informal justru mengalami kenaikan.

Kenaikan status pekerjaan utama sektor informal di Tahun 2023 di pengaruhi oleh kenaikan status pekerjaan berusaha di bantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/pekerja tidak di bayar dari 6,79 persen menjadi 10,23 persen dan status pekerjaan pekerja keluarga/pekerja tidak di bayar dari 8,11 persen naik menjadi 12,01 persen. Sedangkan penghambat kenaikan ini adalah penurunan status pekerja bebas pertanian/non pertanian dari 11,31 persen menjadi 5,93 persen, dan status pekerjaan berusaha sendiri yang turun dari 22,08 persen menjadi 20,57 persen di Tahun 2023.

<https://serangkota.bps.go.id>



# TARAF & POLA KONSUMSI





# Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi adalah susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Setiap orang memiliki pola konsumsi masing-masing, yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan pola konsumsi ini dipengaruhi oleh besar-kecilnya pendapatan, tingkat pendidikan atau pengetahuan, jenis pekerjaan, harga barang dan jasa, dan selera yang sedang berkembang di tengah masyarakat.

Pola konsumsi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya dan lingkungan tempat tinggal. Hal ini karena, kondisi tersebut akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada suatu kelompok masyarakat. Akibatnya, pola konsumsi antar kelompok masyarakat juga dapat berbeda.

Betapapun juga, dalam berkonsumsi, setiap orang atau masyarakat pada umumnya akan mendahulukan barang kebutuhan pokok, baru kemudian memenuhi kebutuhan lainnya.

## **Pengeluaran Penduduk**

Pola konsumsi atau pengeluaran penduduk, secara garis besar dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Pola pengeluaran ini akan berubah, seiring dengan perubahan yang terjadi pada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, proporsi pengeluaran untuk makanan akan menurun, sedangkan pengeluaran bukan makanan akan meningkat.

Pergeseran pola pengeluaran tersebut, dapat terjadi karena elastisitas pendapatan terhadap makanan cukup rendah, sebaliknya terhadap bukan

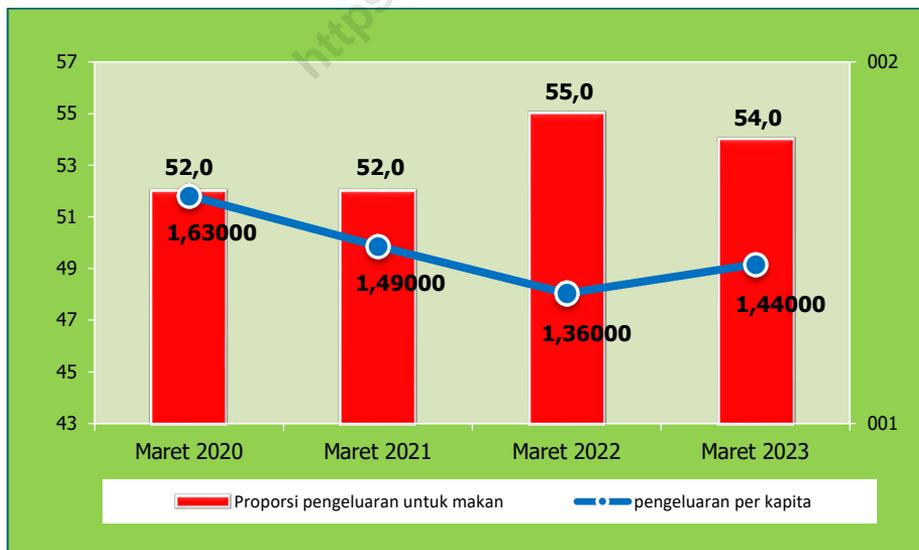
makanan sangat tinggi. Oleh karena itu, kelebihan pendapatan akibat naiknya pendapatan ini, biasanya akan lebih banyak digunakan untuk konsumsi bukan makanan, daripada untuk makanan.

Perubahan pola pengeluaran akibat naiknya pendapatan ini, sebenarnya sudah sejak lama diformulasikan dalam bentuk "Hukum Engel" oleh Ernst Engel (1821-1896). Menurut Engel, bila tidak ada perubahan selera maka dengan meningkatnya pendapatan, proporsi pengeluaran makanan akan menurun, sebaliknya proporsi pengeluaran bukan makanan akan meningkat.

Dengan demikian, proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui adanya perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Gambar 5.1.

Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan dan  
Proporsi Pengeluaran Untuk Konsumsi Makanan per Kapita  
Maret 2020 – 2023



Sumber : BPS-Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi Maret 2020-2023 (data diolah)

Proporsi pengeluaran makanan rata-rata penduduk Kota Serang selama setahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu dari 54,78 persen pada Maret 2022 menjadi 54,20 persen pada Maret 2023. Dan proporsinya lebih tinggi dibandingkan angka Maret 2021 (Gambar 5.1).

Naiknya proporsi pengeluaran makanan tersebut, belum dapat menjadi petunjuk bagi peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat pada saat bersamaan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Serang menurun dari 1,36 juta rupiah 2022 menjadi 1,44 juta rupiah pada Maret 2023.

Bila dilihat menurut kelompok pengeluaran (Tabel 5.1), rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Serang mengalami kenaikan hamper di seluruh sub kelompok pengeluaran. Kenaikan terbesar terjadi pada komoditas dalam sub kelompok makanan/minuman jadi, yang bertambah 25 ribu rupiah hingga menjadi 293 ribu rupiah pada Maret 2023. Adapun sub kelompok daging, buah-buahan, kacang-kacangan, minyak & kelapa, bumbu-bumbuan dan konsumsi lainnya mengalami kenaikan, kenaikan terbesar adalah komoditas minyak dan kelapa yang naik sebesar 5 ribuan rupiah hingga mencapai 22 ribu rupiah.

Diamati menurut proporsi pengeluarannya, terlihat tidak ada pergeseran pada pola pengeluaran penduduk Kota Serang. Pada Maret 2022, tiga komoditas dengan urutan pengeluaran per kapita terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga, bahan makanan, serta makanan/minuman jadi. Demikian pula pada Maret 2023, urutan ketiga komoditas tersebut masih sama seperti tahun 2022.

Tabel 5.1.

Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran  
Maret 2021-2023

Kelompok Pengeluaran	Nominal (Rupiah)			Proporsi (Persen)		
	Maret 2021	Maret 2022	Maret 2023	Maret 2021	Maret 2022	Maret 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Makanan	772,387	744.394	781.625	51.89	54.78	54,20
a. Bahan Makanan	362,438	359.694	373.176	24.35	26.47	25,88
b. Makanan/ Minuman Jadi	292,456	267.869	293.316	19.65	19.71	20,34
c. Rokok	117,493	116.831	115.134	7.89	8.60	7,98
2. Bukan Makanan	766.363	614.501	660.380	48.11	45.22	45,80
a. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	379,755	350.671	353.586	25.51	25.81	24,52
b. Aneka Barang dan Jasa	175,498	134.363	157.371	11.79	9.89	10,91
c. Pakaian	39,149	33.145	39.746	2.63	2.44	2,76
d. Barang Tahan Lama	36,839	33.718	34.594	2.47	2.48	2,40
e. Lainnya	84,940	62.604	75.082	5.71	4,61	5,21
3. Makanan+Bukan Makanan	1,488,569	1.358.895	1.442.005	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi Maret 2020-2022

Sementara itu menurunnya proporsi pengeluaran makanan penduduk Kota Serang dan naiknya proporsi pengeluaran non makanan 2023 dapat kita lihat pada (Tabel 5.2).

Tabel 5.2.

Komposisi Rata-Rata Pengeluaran per Kapita  
Menurut Kelompok Pengeluaran Maret 2021-2023 (Persen)

Kelompok Pengeluaran	Perkotaan		
	Maret 2021	Maret 2022	Maret 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Makanan	51.89	54.78	54,20
a. Bahan Makanan	24.35	26.47	25,88
b. Makanan/ Minuman Jadi	19.65	19.71	20,34
c. Rokok	7.89	8.60	7,98
2. Bukan Makanan	48.11	45.22	45,80
a. Perumahan	25.51	25.81	24,52
b. Barang dan Jasa	11.79	9.89	10,91
c. Pakaian	2.63	2.44	2,76
d. Barang Tahan Lama	2.47	2.48	2,40
e. Lainnya	5.71	4,61	5,21
3. Makanan+ Bukan Makanan	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi Maret 2021-2023

Masih tingginya proporsi pengeluaran makanan di Kota Serang, menandakan bahwa masih ada wilayah di beberapa kelurahan yang daerahnya masih belum layak di sebut dengan perkotaan, meskipun secara administrasi adalah daerah perkotaan. Hal tersebut, sangat mudah untuk dipahamii karena setiap orang atau rumah tangga dengan pendapatan yang relatif rendah, biasanya akan memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya, yang dalam hal ini adalah makana dengan rata-rata penduduk sendiri memang memiliki pendapatan yang rendah. Setidaknya bila dibandingkan dengan penduduk perkotaan yang sebenarnya.

### Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein, merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi, dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam masing-masing makanan tersebut.

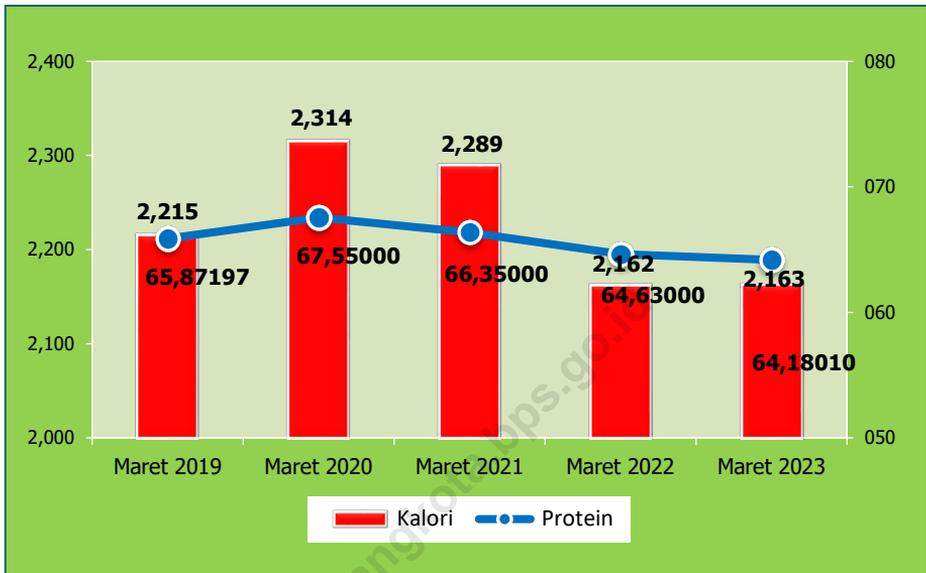
Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh, untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Gambar 5.2 menyajikan rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita sehari penduduk Kota Serang. Terlihat bahwa rata-rata konsumsinya selama setahun terakhir mengalami penurunan, yaitu dari 2.314 kkal pada Maret 2020 menjadi 2.289 kkal pada Maret 2021, 2.162 kkal pada Maret 2022 dan naik sedikit di 2023 sebesar 2.163. Dengan demikian, angka konsumsi kalori ini jauh berada di atas batas kecukupan energi yang telah ditetapkan. Bahkan, rata-rata konsumsinya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indonesia yang hanya 2.143 kkal.

Adapun rata-rata konsumsi protein per kapita sehari penduduk Kota Serang, pada saat bersamaan mengalami penurunan 0,45 gram pada Maret 2023. Meskipun demikian, angka konsumsi protein ini juga sudah melebihi batas kecukupan protein yang telah ditentukan, yang mencapai 57 gram per kapita sehari. Selain itu, rata-rata konsumsi protein tersebut juga sudah berada di atas rata-rata Nasional yang sebanyak 62,3 gram.

Gambar 5.2.

Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari  
Maret 2019-Maret 2023



Sumber : BPS-Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi Maret 2016-2022 (data diolah)

Berdasarkan turunnya rata-rata konsumsi kalori dan konsumsi protein per kapita sehari ini, belum dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kota Serang mengalami peningkatan. Di samping itu, di saat yang bersamaan, kedua jenis konsumsi tersebut telah melebihi batas kecukupan energi dan protein yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan RI pada tahun 2018.

Dari tabel (Tabel 5.3), dapat kita lihat rata-rata konsumsi kalori dan protein perkapita per hari di Kota Serang pada periode Maret 2021 – Maret 2023.

Konsumsi kalori juga mengalami penurunan dari 2.162 kkal pada 2022 turun menjadi 2.162,67 kkal di 2023. Begitu juga dengan protein, juga mengalami penurunan dari 64,63 gram pada 2022 menjadi 64,18 gram di 2023.

Tabel 5.3.

Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari  
Maret 2021-2023

Jenis Konsumsi	Maret 2021	Maret 2022	Maret 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Kalori	2 289,14	2.162	2.162,67
B. Protein	66,35	64.63	64,18
1. Nabati	48,78	46.53	47,04
2. Hewani	17,57	18.11	17,14
a. Ikan	8,30	8.98	8,53
b. Daging	5,35	5.44	5,31
c. Telur dan Susu	3,92	3.68	3,30

Sumber : BPS-Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi Maret 2021-2023

Menurunnya konsumsi protein per kapita sehari penduduk Kota Serang, terutama disebabkan oleh turunnya konsumsi protein hewani dari 18,11 di 2022 menurun menjadi 17,14 di 2023, dimana dari 3 komoditi protein hewani semuanya mengalami penurunan. Sedangkan dari protein nabati mengalami kenaikan dari 46,53 di 2022 naik menjadi 47,04 di tahun 2023.

Di sisi lain, tingkat konsumsi ikan, daging, serta telur dan susu, per kapita sehari penduduk Kota Serang, ternyata masih di bawah rata-rata Provinsi Banten dan di atas rata-rata nasional. Kondisi yang demikian setidaknya dapat diketahui dari rata-rata konsumsi protein penduduk Kota Serang yang berasal dari ketiga sumber protein hewani tersebut masing-masing mencapai 8,53 gram, 5,31 gram dan 3,30 gram. Rata-rata konsumsi tersebut masih di bawah rata-rata protein penduduk Banten untuk ketiga sumber protein ini,

masing-masing mencapai 9,9 gram, 5,4 gram dan 3,9 gram per kapita sehari. Adapun masih diatas untuk Indonesia, rata-rata hanya sebesar 8,7 gram, 4,4 gram dan 3,5 gram per kapita per hari.

<https://serangkota.bps.go.id>



Bab

6

# PERUMAHAN



# VI Perumahan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, setelah pangan dan sandang. Rumah berfungsi sebagai sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian. Selain itu, rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Oleh karena itu, rumah menjadi faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kreativitas kerja orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Secara umum, rumah dapat diartikan sebagai bangunan yang selama jangka waktu tertentu dijadikan tempat tinggal. Adapun dalam arti khusus, istilah rumah mengacu pada konsep-konsep sosial kemasyarakatan, yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain ([id.wikipedia.com](http://id.wikipedia.com)).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992, mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah yang layak huni adalah rumah sehat, dalam hal ini harus memenuhi standar kesehatan, agar penghuni rumah dapat terjamin kesehatannya. Menurut Kemenkes RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat, yaitu: Pertama, dapat memenuhi kebutuhan fisiologis yang dalam hal ini adalah pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, serta terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah.

Ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antara penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran. Keempat, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan, baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah.

Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga dapat menunjukkan status sosial pemiliknya. Hal ini karena, status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas atau kondisi rumah yang dihuni atau dimilikinya. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

### **Kualitas Rumah Tinggal**

Kualitas rumah tinggal yang baik atau layak huni, pasti akan membuat penghuninya merasa aman, terlindung dan terjamin kesehatannya. Ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan kualitas rumah tinggal layak huni, yaitu jenis lantai rumah bukan dari tanah/lainnya, atap bukan dari ijuk/lainnya dan dinding dari tembok, plesteran ayaman bambu/kawat atau kayu/batang kayu.

Lantai rumah harus kuat untuk menahan beban di atasnya, tidak licin, stabil waktu dipijak, dan mudah dibersihkan. Bila musim hujan, lantai juga tidak boleh lembab, karena dapat menimbulkan gangguan/penyakit terhadap penghuninya. Agar tidak lembab, lantai rumah perlu dilapisi dengan lapisan yang kedap air, seperti marmer, keramik, ubin dan lapisan anti lembab lainnya. Dengan demikian, salah satu ciri rumah layak huni itu adalah bukan berlantai tanah/lainnya.

Gambar 6.1.

Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Lantai Terluas Bukan Tanah/Lainnya Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2021-2023



Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021-2023 (data diolah)

Berdasarkan hasil Susenas (Gambar 6.1), terlihat bahwa hampir semua rumah tangga yang ada di Kota Serang sudah menempati rumah yang bercirikan layak huni. Kondisi ini ditandai oleh persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan lantai terluas bukan tanah/lainnya, yang pada

tahun 2023 sudah mencapai 97,67 persen. persentasenya menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 98.13 persen dan tahun 2021 98.57 persen. Namun demikian, besaran persentasenya masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi sebesar 98,22 persen.

Selain lantai, atap rumah juga mempengaruhi kualitas rumah layak huni. Atap yang baik harus mampu melindungi rumah dari perubahan cuaca, baik panas dan hujan maupun petir, angin, debu, dan sebagainya. Adapun atap yang layak menurut kriteria tersebut adalah atap yang terbuat bukan dari ijuk/lainnya.

Gambar 6.2.

Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Atap Terlulus Bukan dari Ijuk/Lainnya Tahun 2021 - 2023



Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021-2023 (data diolah)

Sama seperti lantai terluas, hampir semua rumah tangga di Kota Serang sudah menempati rumah dengan ciri-ciri layak huni, yaitu memiliki atap terluas bukan dari ijuk/lainnya (Gambar 6.2). Bahkan, persentasenya pada

tahun 2021 sudah seratus persen. Akan tetapi di 2022 persentasenya turun menjadi 99,47 persen, dan di 2023 naik lagi menjadi 99,84 persen. Selain itu, besaran persentasenya masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi yang sebesar 99,12 persen.

Gambar 6.3.

Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Dinding Layak  
Tahun 2021-2023



Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021-2023 (data diolah)

Selain lantai dan atap, dinding rumah juga turut mempengaruhi kualitas rumah layak huni. Dinding yang baik, harus tegak lurus agar dapat memikul berat dinding sendiri dan beban tekanan angin, serta mampu memikul beban di atasnya. Dinding harus dipisahkan dari pondasi, serta dilapisi oleh lapisan kedap air. Pelapisan ini dimaksudkan agar air tanah tidak meresap naik, sehingga dinding terhindar dari basah, lembab, tampak bersih dan tidak berlumut. Adapun jenis dinding yang layak menurut kriteria ini, hanyalah yang menggunakan tembok, plesteran ayaman bambu/kawat atau kayu/batang kayu.

Berdasarkan hasil Susenas (Gambar 6.3), sebagian besar rumah tangga di Kota Serang terlihat sudah menempati rumah bercirikan layak huni, yakni memiliki dinding terluas dari tembok, plesteran ayaman bambu/kawat atau kayu/ batang kayu. Hal ini ditandai dengan proporsinya yang pada tahun 2023 mencapai 99,29 persen. persentasenya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan 2021 yaitu sebesar 99,75 persen. Selain itu, besaran persentasenya juga masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Banten yang sebesar 94,42 persen.

Selain dilihat dari kualitas rumah, rumah yang layak huni atau rumah sehat harus mampu memberikan privasi kepada para penghuninya. Pemberian privasi ini didekati dengan luas lantai per kapita. Ada beberapa batasan minimal luas lantai per kapita, salah satunya dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), yang menyatakan bahwa rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 meter persegi (BPS, 2001).

Menurut hasil Susenas yang disajikan pada Gambar 6.4, sebagian besar rumah tangga di Kota Serang terlihat sudah menempati rumah dengan ciri-ciri layak huni, yaitu memiliki luas lantai per kapita minimal 10 meter persegi. Pada 2023 luas lantai perkapita minimal 10 meter sebesar 90,16 persen, turun bila di banding 2022 sebesar 91,61 persen. Bahkan, persentasenya jauh lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yang mencapai 88,48 persen.

Diamati menurut daerah tempat tinggal, peningkatan rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita minimal 10 meter persegi ini, terjadi di semua daerah tempat tinggal.

Gambar 6.4.

Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah menurut Luas Lantai per Kapita Tahun 2021-2023



Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021-2023 (data diolah)

### Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal yang lengkap, sudah tentu akan menambah kenyamanan dan memberikan kemudahan dalam beraktifitas, serta meningkatkan derajat kesehatan penghuninya. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas ini adalah tersedianya air minum bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik.

Air minum bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Air minum bersih didefinisikan sebagai air yang bersumber dari air kemasan,

air isi ulang dan air ledeng. Termasuk juga air minum bersih adalah air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, yang jarak ke tempat penampungan kotoran tinja minimal 10 meter.

Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2023 mencapai 74,56 persen, atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,81 persen (Tabel 6.1). Persentasenya lebih rendah dari rata-rata Provinsil yang sebesar 74,37 persen, akan tetapi masih di bawah rata-rata nasional sebesar 76,11 persen. Perbedaan yang sangat besar ini, terutama terjadi karena adanya perbedaan gaya hidup dalam mengkonsumsi air minum bersih.

Ketersediaan sanitasi yang layak merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan diri dan lingkungan. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal ini adalah ketersediaan tempat buang air besar sendiri. Selain itu, ada pula akses terhadap sanitasi layak, yang didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri dan bersama, menggunakan kloset leher angsa, dan menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran atau tinja.

Berdasarkan hasil Susenas (Tabel 6.1), rumah tangga di Kota Serang pada umumnya sudah memiliki kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungannya. Hal ini terlihat dari tingginya persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dan yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, yang masing-masing mencapai 88,02 persen dan 92,36 persen.

Kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan ini, sudah banyak dimiliki oleh rumah tangga yang tinggal di Kota Serang. Kondisi ini terlihat jelas dari banyaknya persentase rumah tangga yang menggunakan atau yang memiliki akses terhadap kedua jenis fasilitas sanitasi tersebut.

Tabel 6.1.

Persentase Rumah tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2021-2023

Fasilitas Perumahan	Kota Serang		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Kemasan, Air Isi Ulang dan Ledeng (Persen)	68.33	62.45	72,75
Air Minum Bersih (Persen)	77.92	74,81	74,56
Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri (Persen)	91.05	86.61	88,02
Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen)	90.76	91.55	92,36
Penerangan Listrik (Persen)	100	100	100

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021-2023

Masyarakat di Kota Serang terutama di daerah pedesaan, yang masih rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sehingga mereka tidak atau belum dapat memiliki kedua jenis fasilitas sanitasi di atas. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bila hal itu juga banyak dipengaruhi oleh faktor budaya atau kebiasaan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

Sementara itu fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas (Tabel 6.1), terlihat hampir semua rumah tangga pada setiap daerah tempat tinggal sudah menikmati fasilitas penerangan listrik. Dalam hal ini, secara keseluruhan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 ada 100 persen rumah tangga yang telah menikmati

fasilitas tersebut. Bahkan. Besaran angka persentasenya juga lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yang sebesar 99,79 persen.

**Status Kepemilikan Rumah Tinggal**

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Hal ini karena, kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dan lainnya (rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya). Adapun rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 6.2.

Persentase Rumah tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2021 - 2023

Status Kepemilikan	Perkotaan		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Milik Sendiri	87.59	90.55	86,96
2. Bukan Milik Sendiri	12.41	9.45	13,04
a. Kontrak/Sewa	6.84	4.68	3,87
b. Bebas Sewa	4.94	4.77	9,16
c. Lainnya	0.63	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021-2023

Berdasarkan hasil Susenas 2023, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 86,96 persen, mengalami penurunan dibanding 2022 yaitu 90,55 persen. Dan 2021 sebesar 87,59 persen. Penurunan persentase kepemilikan rumah milik sendiri, mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Serang telah mampu memenuhi akan kebutuhan rumah tinggal yang layak.

<https://serangkota.bps.go.id>



# KEMISKINAN & KETIMPANGAN





# Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan masih menjadi masalah kronis di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kemiskinan yang sebelumnya menjadi tujuan utama agenda pembangunan “*Millennium Development Goals (MDGs)*”, kembali menjadi tujuan utama dalam “*Sustainable Development Goals (SDGs)*”. Terkait kemiskinan ini, SDGs menargetkan penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk di wilayah manapun pada tahun 2030.

Kemiskinan di Indonesia juga selalu menjadi prioritas pemerintah, sehingga menjadi agenda rutin dalam Rencana Pembangunan Nasional. Dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat turun menjadi 6%—7% pada 2024 dari angka *baseline* 9,45% pada 2019.

Adapun program-program intervensi yang dilaksanakan saat ini menurut Presiden Joko Widodo (Kemenkeu, 2020), meliputi program pengurangan beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu sembako.

Disamping itu, dari sisi pemberdayaan *income generating* untuk warga miskin, ada Kredit Untuk Rakyat (KUR), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, dan Ultra Mikro (UMI). Bahkan ada pula, program pengentasan kemiskinan lewat BUMN dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* swasta.

Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan memang tidak dapat teratasi dengan mudah. Hal ini karena, kemiskinan adalah persoalan multi dimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, digunakan indikator kemiskinan. Indikator tersebut antara lain mencakup garis kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin ( $P_0$ ), indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ), dan indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ). Keempat indikator ini juga digunakan sebagai alat perencanaan dan indikator target pencapaian, serta bahan untuk evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Adapun data kemiskinan yang digunakan bersumber dari Susenas, yang dilaksanakan pada tiap bulan Maret dan September.

### Perkembangan Garis Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Penghitungan angka kemiskinan menggunakan garis kemiskinan yang diperoleh dari data pengeluaran, sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Adapun penduduk miskinnya, didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kota Serang dalam lima tahun terakhir, terus mengalami peningkatan. Pada 2019, garis kemiskinannya mencapai 379 ribu rupiah per kapita sebulan, kemudian secara bertahap meningkat hingga menjadi 412 ribu rupiah per kapita sebulan pada 2020, 431 ribu rupiah pada tahun 2021, 466 ribu rupiah tahun 2022 dan 512 ribu rupiah pada tahun 2023 (Tabel 7.1). Meningkatnya garis kemiskinan ini terjadi seiring dengan naiknya harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berakibat dengan tingginya biaya hidup. Selain itu, adanya perubahan selera atau gaya hidup, yang mengubah pola konsumsi rumah tangga juga turut mendorong naiknya garis kemiskinan.

Tabel 7.1.

Garis Kemiskinan di Kota Serang 2019-2023  
(Rupiah per Kapita Sebulan)

Tahun	Garis Kemiskinan
(1)	(2)
2019	379.641
2020	411.595
2021	431.210
2022	466.252
2023	511.575

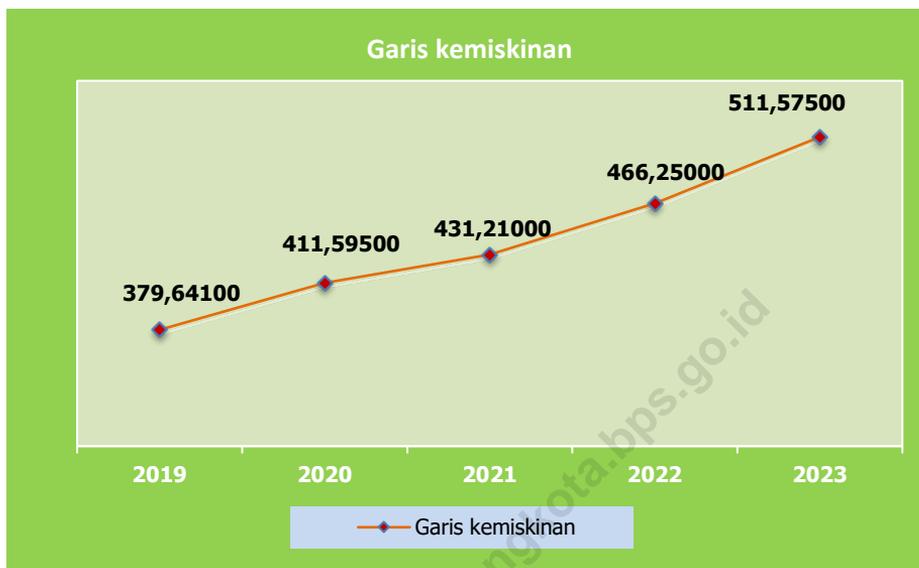
Sumber : BPS Provinsi Banten

Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan, dihitung berdasarkan 52 komoditi kebutuhan dasar makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Adapun garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai pengeluaran atau kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, yang dihitung berdasarkan 36 komoditi kebutuhan dasar bukan makanan.

Berdasarkan kelompok pengeluaran (Gambar 7.1), terlihat bahwa garis kemiskinan di Kota Serang terus mengalami kenaikan tiap tahun nya. Dari 2019 garis kemiskinan Kota Serang sebesar Rp. 379.641, kemudian di 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,42 persen menjadi Rp. 411.595 dan di 2021 naik 4,77 persen menjadi Rp. 431.210, di 2022 menjadi 466.252 atau naik 8,13 persen dan di 2023 naik sebesar 9,72 persen menjadi Rp. 511.575.

Gambar 7.1.

Garis Kemiskinan di Kota Serang  
2019 - 2023 (Ribu rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Banten (data diolah)

### Perkembangan Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Kota Serang pada Maret 2023 mencapai 6,2 persen atau sebesar 44.990 orang. Berarti, mengalami peningkatan dibandingkan periode 2022 yang mencapai 5,97 persen atau 42.560 orang dan 2021 sebesar 6,79 persen atau 47.910 orang dan 2020 sebesar 6,06 persen atau 42.240 orang.

Persentase penduduk kemiskinan Kota Serang tahun 2023 naik 0,23 point di bandingkan tahun 2022, angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Banten yang mencapai 6,17 persen, akan tetapi lebih rendah dari rata-rata Nasional sebesar 9,36 persen. Dengan angka sebesar itu, Kota Serang berada di posisi keempat sebagai kab/kota dengan tingkat kemiskinan terendah se Banten, di bawah Kota Tangerang Selatan (2,57 persen), Kota Ciegon (3,98 persen), Kab. Serang (4,85 persen). Posisi 3 teratas adalah

Kab. Tangerang (6,93 persen), kabupaten lebak (8,68 persen) dan posisi teratas adalah Kabupaten Pandeglang sebesar (9,27 persen).

Tabel 7.2.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kota Serang  
Maret 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2019	36,21	5,28
2020	42,24	6,06
2021	47,91	6,79
2022	42.56	5,97
2023	44.99	6,20

Sumber : BPS Provinsi Banten

Rendahnya tingkat kemiskinan ini, bukan berarti masalah kemiskinan tidak lagi menjadi prioritas utama. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi program prioritas, karena hidup yang layak menjadi hak semua orang dan inilah yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Serang dan Provinsi Banten. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten.

Terlebih lagi, jumlah penduduk miskin di Kota Serang masih cukup besar, yakni sebanyak 45 ribu orang. Selain itu, jumlahnya juga mengalami peningkatan dibandingkan periode Maret 2022 yang mencapai 43 ribu orang.

Bila di cermati, jumlah penduduk miskin di semua kabupaten/kota di Provinsi Banten mengalami penurunan, ini menandakan bahwa perekonomian mulai bangkit akibat terpurukan dampak covid 19.

### Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan, bukan hanya sekadar mengukur berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu, selain menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan digunakan indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*,  $P_1$ ).  $P_1$ , akan melihat rata-rata jarak pengeluaran per kapita penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai  $P_1$ , semakin jauh jaraknya terhadap garis kemiskinan. Sementara indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*,  $P_2$ ), adalah indikator untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan.  $P_2$ , dapat menunjukkan sebaran pengeluaran penduduk miskin. Semakin tinggi nilai  $P_2$ , semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin.  $P_1$  dan  $P_2$  dapat menunjukkan kualitas dari kemiskinan di suatu daerah.

Tabel 7.3.

Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )  
Kota Serang 2019-2023

Periode	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ )	Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )
(1)	(2)	(3)
2019	0,51	0,11
2020	0,57	0,10
2021	0,92	0,22
2022	0,77	0,17
2023	0,75	0,16

Sumber : BPS Provinsi Banten

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 7.4, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Seraang pada 2023 mencapai 0,75, menurun 0,02 point dibandingkan kondisi 2022 sebesar 0,77. Adapun, indeks keparahan kemiskinan (P2) ternyata juga mengalami penurunan sebesar 0,01 poin pada 2023 mencapai 0,16 dibandingkan kondisi 2022 sebesar 0,17.

Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan selama periode 2021 - 2023, menjadi penanda bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin pada periode tersebut semakin menjauhi garis kemiskinan. Begitu pula tingkat kesenjangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskinnya, yang pada saat bersamaan semakin menyempit, dengan ditandai oleh menurunnya indeks keparahan kemiskinan.

Menurunnya angka  $P_1$  ini, sepertinya terjadi karena pendapatan yang diterima penduduk miskin masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan garis kemiskinan. Imbasnya, jumlah dan persentase penduduk miskin semakin menurun. Di sisi lain, kenaikan pendapatan yang diterima penduduk miskin tersebut yang semakin meningkat sehingga tingkat kesenjangan atau indeks keparahan kemiskinannya menjadi berkurang. Dengan demikian, kualitas hidup penduduk miskin di Kota Serang selama setahun terakhir mengalami penurunan.

Sementara itu menurunnya kualitas hidup penduduk miskin, akan semakin mempersulit pemerintah dalam upayanya mengentaskan kemiskinan di masa mendatang. Hal ini karena, biaya yang nanti akan dikeluarkannya menjadi semakin bertambah. Di sisi lain, pemerintah juga harus terus menerus bekerja keras dan konsisten dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan.

### **Ketimpangan Pendapatan**

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan harus berujung pada naiknya tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat. Berarti, bukan hanya pendapatan

saja yang meningkat, ketimpangan pendapatan antar penduduk atau antar kelompok masyarakat juga harus berhasil diturunkan. Bila tidak berhasil diturunkan, pasti akan menimbulkan berbagai masalah sosial di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan, idealnya menggunakan data pendapatan. Hanya saja data pendapatan tidak tersedia di Indonesia, karena itu pengukurannya menggunakan data pengeluaran sebagai proksi dari pendapatan. Penggunaan data pengeluaran ini menyebabkan angka ketimpangan yang dihasilkan menjadi bias ke bawah. Namun demikian, angka ketimpangannya tetap dapat digunakan sebagai arah untuk melihat perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah Indeks Gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Angka Indeks Gini bernilai 0, menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap (kelompok) orang memiliki pendapatan yang sama. Sementara bila bernilai 1, menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu (kelompok) orang memiliki segalanya, sedangkan yang lain tidak memiliki apa-apa.

Selain Indeks Gini, indikator lainnya adalah tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk menurut kriteria Bank Dunia. Tingkat ketimpangan pendapatan ini dibentuk dengan mengacu kepada proporsi pendapatan dari 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Adapun penggolongannya mengikuti aturan sebagai berikut :

- a. Memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- b. Memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang,
- c. Memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Berdasarkan data pada Tabel 7.5, terlihat bahwa Indeks Gini di Kota Serang selama setahun terakhir ini mengalami peningkatan. Pada periode 2023, besaran indeks gini sebesar 0,368 meningkat bila di bandingkan 2022 sebesar 0,354 dan 2021 sebesar 0,340. Berarti, tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kota Serang selama periode tersebut memang telah mengalami peningkatan.

Sementara itu proporsi pengeluaran 40 persen penduduk berpendapatan rendah selama 2023 turun menjadi 15,82 persen dibanding 2022 sebesar 19,69 persen dan 2021 sebesar 14,09 persen. Kedua hal ini dapat menjadi penanda bahwa pendapatan sekaligus pengeluaran penduduk miskin selama setahun terakhir memang meningkat. Adapun angka proporsinya yang lebih dari 17 persen, menunjukkan bahwa status ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kota Serang masih termasuk dalam kategori "Rendah".

Tabel 7.4

Distribusi Persentase Pengeluaran Penduduk Kriteria Bank Dunia dan Indeks Gini, Maret 2019-2023

Tahun	Kelompok Pengeluaran (Persen)			Indeks Gini
	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	19,96	36,93	43,11	0,342
2020	19,59	36,15	44,25	0,352
2021	14,09	26,04	59,87	0,340
2022	19,69	36,56	43,72	0,354
2023	15,82	26,46	57,71	0,368

Sumber : BPS Provinsi Banten

Di sisi lain, proporsi pengeluaran 40 persen penduduk berpendapatan menengah selama periode Maret 2023 meningkat dari 36,56 persen menjadi 26,46 persen. Sebaliknya untuk 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi proporsi pengeluarannya justru meningkat hingga menjadi 57,71 persen. Kedua kondisi inilah yang menjadi penyebab dari naiknya Indeks Gini pada periode tersebut.

Secara umum total pengeluaran perkapita di Kota Serang pada tahun 2023 lebih banyak digunakan untuk konsumsi makanan. Persentase pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan sebanyak 54,20 persen dan 45,80 persen untuk konsumsi non makanan. Jika dilihat dari tabel dibawah bahwa terjadi pergeseran komposisi pengeluaran. Komoditi makanan dan minuman jadi paling besar komposisi pengeluarannya untuk makanan yaitu 20,34 persen, hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Kota Serang senang makan diluar karena banyaknya tempat makan yang baru dibuka dan di lengkapi dengan sport ber swafoto. Fenomenanya masyarakat makan tidak untuk memenuhi kebutuhan perut saja tapi lebih ke wisata dan kesenangan. (Tabel 7.6).

Sedangkan pengeluaran non makanan Kota Serang sebesar 45,80 persen, pengeluaran sebagian besar dipergunakan untuk konsumsi Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga sebesar 24,52 persen, dan terendah adalah konsumsi Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri sebesar 1,26 persen.

Tabel 7.5.  
Pengeluaran Perkapita Perbulan dan Persentase  
Penduduk Kota Serang Tahun 2023

Konsumsi	Pengeluaran Rata- Rata (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(5)
<b>Makanan</b>	<b>744.394</b>	<b>54,20</b>
a. Padi-padian	73.403	5,09
b. Umbi-umbian	6.323	0,44
c. Ikan	52.686	3,65
d. Daging	35.538	2,46
e. Telur dan Susu	34.534	2,39
f. Sayur-sayuran	54.476	3,78
g. Kacang-kacangan	19.305	1,34
h. Buah-buahan	32.995	2,29
i. Minyak dan Lemak	16.109	1,12
j. Bahan Minuman	17.878	1,24
k. Bumbu-bumbuan	14.338	0,99
l. Bahan Makanan	15.592	1,08
m. Makanan Minuman Jadi	293.316	20,34
n. Rokok dan Tembakau	115.134	7,98
<b>Bukan Makanan</b>	<b>781.625</b>	<b>45,80</b>
a. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	353.586	24,52
b. Aneka Barang dan Jasa	157.371	10,91
c. Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	39.746	2,76
d. Barang Tahan Lama	34.594	2,40
e. Pajak, Pungutan, dan Asuransi	56.954	3,95
f. Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	18.128	1,26
<b>Total</b>	<b>1.442.005</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Provinsi Banten



# DAFTAR PUSTAKA



# Daftar Pustaka

- Alodokter, 2018. Keluarga. Retrieved from Alodokter.com:  
<https://www.alodokter.com/pentingnya-inisiasi-menyusui-dini-untuk-kesehatan-bayi>
- Balitbang Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Laporan Nasional RISKESDAS 2018*. Kementerian Kesehatan RI: Jakarta
- BBC Indonesia. 2008. Indonesian. Retrieved from Bbc.co.uk:  
[http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2008/04/printable/080423\\_pregnancy.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2008/04/printable/080423_pregnancy.shtml)
- BPJS Kesehatan. 2022. Indonesia. Retrieved From bpjs.go.id :  
<https://faskes.bpjs-kesehatan.go.id>
- BPS Provinsi Banten. 2023. *Proyeksi Penduduk Provinsi Banten 2020-2035*. BPS Provinsi Banten: Kota Serang
- BPS. 2021. *Kota Serang Dalam Angka 2021*. BPS Kota Serang: Kota Serang
- BPS. 2022. *Kota Serang Dalam Angka 2022*. BPS Kota Serang: Kota Serang
- BPS. 2023. *Kota Serang Dalam Angka 2023*. BPS Kota Serang: Kota Serang
- BPS. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Serang 2020*. BPS Kota Serang: Kota Serang
- BPS. 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Serang 2021*. BPS Kota Serang: Kota Serang

- BPS. 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Serang 2022*. BPS Kota Serang: Kota Serang
- BPS. 2023. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Serang 2023*. BPS Kota Serang: Kota Serang
- BPS. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2020*. BPS Provinsi Banten: Kota Serang
- BPS Provinsi Banten. 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2021*. BPS Provinsi Banten: Kota Serang
- BPS Provinsi Banten. 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2022*. BPS Provinsi Banten: Kota Serang
- BPS Provinsi Banten. 2023. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2023*. BPS Provinsi Banten: Kota Serang
- Handayani D, Sari RK. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan pada Anak Indonesia (Pengaruh Kemiskinan dan Karakteristik Ibu). *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*. 2020;16(3): 305-316.
- Kemenkeu Ri. 2020. Berita. Retrieved From [www.kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id)  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-minta-pengentasan-kemiskinan-terkonsolidasi-terintegrasi-dan-tepat-sasaran/>
- Mardiah D, Amir Y. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Rendahnya Cakupan Dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak. *Jurnal Ners Indonesia*. 2017; 8(1): 23-32.
- Putri, Winda Destiana. 2017. News. Retrieved from [Republika.CO.ID: https://republika.co.id/berita/omduca359/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun](https://republika.co.id/berita/omduca359/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun)

# LAMPIRAN



# Lampiran

## Lampiran 1.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin  
Tahun 2021-2023(Ribu Orang)

Kabupaten/ Kota	2021			2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Kota Serang</b>	362	346	708	367	352	718	370	354	724
<b>Provinsi Banten</b>	6.127	5.894	12.023	6.196	5.971	12.167	6.263	6.045	12.308

Sumber : Proyeksi Penduduk Banten 2020-2035

## Lampiran 2.

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Tahun 2021-2023

Kelompok Umur	2021			2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>0-4</b>	9,19	9,14	9,16	8,92	8,88	8,90	8,68	8,65	8,67
<b>5-9</b>	9,44	9,44	9,44	9,32	9,30	9,31	9,18	9,13	9,15
<b>10-14</b>	8,98	8,84	8,91	8,95	8,84	8,90	8,94	8,87	8,91
<b>15-19</b>	8,90	8,70	8,80	8,73	8,52	8,63	8,59	8,38	8,49
<b>20-24</b>	9,26	9,19	9,22	9,06	8,95	9,01	8,85	8,70	8,78
<b>25-29</b>	9,00	9,03	9,01	8,99	9,01	9,00	8,98	8,99	8,99
<b>30-34</b>	8,81	8,81	8,81	8,74	8,76	8,75	8,65	8,69	8,67
<b>35-39</b>	7,79	7,76	7,77	7,93	7,88	7,91	8,08	8,02	8,05
<b>40-44</b>	7,10	7,09	7,10	7,09	7,06	7,08	7,08	7,04	7,06
<b>45-49</b>	6,26	6,36	6,31	6,35	6,43	6,39	6,42	6,48	6,45
<b>50-54</b>	5,19	5,22	5,20	5,30	5,36	5,33	5,40	5,51	5,45
<b>55-59</b>	4,03	4,01	4,02	4,16	4,16	4,16	4,29	4,30	4,30
<b>60-64</b>	2,80	2,77	2,79	2,94	2,93	2,94	3,09	3,09	3,09
<b>65-69</b>	1,87	1,92	1,90	1,96	2,00	1,98	2,04	2,08	2,06
<b>70-75</b>	0,80	0,94	0,87	0,95	1,08	1,01	1,10	1,23	1,17
<b>75+</b>	0,58	0,80	0,69	0,59	0,82	0,70	0,61	0,86	0,73
<b>Jumlah</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Proyeksi Penduduk Banten 2020-2035

## Lampiran 3.

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan  
Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan dan Daerah Tempat Tinggal,  
Tahun 2020-2023

Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Serang			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	
<b>Rumah Sakit</b>	14,21	15,52	6,18	15,70
<b>Praktek Dokter/Bidan/Klinik/Praktek Dokter Bersama</b>	61,53	62,4	21,8	47,85
<b>Puskesmas/Pustu</b>	29,91	25,05	75,41	37,83
<b>Unit Pelayanan Kesehatan Lainnya</b>	0,26	0,00	0,02	0,16
<b>Praktek Pengobatan Tradisional</b>	1,86	1,84	0,27	1,75
<b>Lainnya</b>	0,00	0,00	0,22	0,00

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2023

## Lampiran 4.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  
Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2021-2023

Ijazah Tertinggi	Kota Serang		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tidak Mempunyai Ijazah</b>	13,66	13,66	11,01
<b>SD/MI</b>	29,46	29,46	30,92
<b>SMP/MTs</b>	23,24	23,24	23,58
<b>SMA/MA</b>	19,31	19,31	19,66
<b>SMK/MAK</b>	5,97	5,97	7,17
<b>Diploma I dan II</b>	0,08	0,08	0,14
<b>Akademi/ Diploma III</b>	0,85	0,85	0,37
<b>Diploma IV/S1/S2/S3</b>	7,43	7,43	7,16

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021-2023

## Lampiran 5.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  
Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin,  
Tahun 2021-2023

Ijazah Tertinggi	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Tidak Mempunyai Ijazah</b>	7,76	11,51	9,66	13,50	23,65	12,38	10,55	13,66	11,01
<b>SD/MI</b>	25,45	29,02	31,23	26,84	31,48	30,60	26,13	29,46	30,92
<b>SMP/MTs</b>	22,93	23,44	23,40	22,08	22,32	23,76	22,52	23,24	23,58
<b>MA/MA</b>	25,59	20,14	20,21	23,03	15,44	19,10	24,34	19,31	19,66
<b>SMK/MAK</b>	7,98	6,18	7,63	5,58	4,98	6,70	6,81	5,97	7,17
<b>Diploma I dan II</b>	0,48	0,03	0,24	0,42	0,29	0,02	0,45	0,08	0,14
<b>Akademi/ Diploma III</b>	0,97	1,04	0,46	1,34	0,00	0,28	1,15	0,85	0,37
<b>Diploma IV/ S1/S2/S3</b>	8,85	8,64	7,15	7,21	1,84	7,16	8,04	7,43	7,16

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021-2023

## Lampiran 6.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  
Menurut Jenis Kegiatan Agustus 2021-2023

Jenis Kegiatan	Kota Serang		
	Ags 2021	Ags 2022	Ags 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Angkatan Kerja (Ribuan Orang)</b>	320.184	339.958	363.850
<b>a. Bekerja</b>	290.045	312.198	336.725
<b>b. Pengangguran Terbuka</b>	30.139	27.760	27.125
<b>2. Bukan Angkatan Kerja (Ribuan Orang)</b>	194.877	184.643	167.810
<b>3. Penduduk Usia Kerja (Ribuan Orang)</b>	515.061	524.601	531.660
<b>4. TPAK (Persen)</b>	62.16	64.80	68,44
<b>5. TPT (Persen)</b>	9.41	8.17	7,45

Sumber : BPS Provinsi Banten

## Lampiran 7.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  
Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin,  
Agustus 2021-2023

Jenis Kegiatan	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki+ Perempuan		
	Ags 2021	Ags 2022	Ags 2023	Ags 2021	Ags 2022	Ags 2023	Ags 2021	Ags 2022	Ags 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1. Angkatan Kerja</b>	78,47	79,6	84,56	45,03	49,25	51,65	62,16	64,80	68,44
<b>a. Bekerja</b>	70,47	73,3	78,0	41,44	45,02	48,07	56,31	59,51	63,33
<b>b. Pengangguran Terbuka</b>	8,00	6,31	6,56	3,59	4,23	3,59	5,85	5,29	5,10
<b>2. Bukan Angkatan Kerja</b>	21,53	20,3	15,44	54,97	50,75	48,35	37,84	35,20	31,56
<b>3. Penduduk Usia Kerja</b>	72,39	72,80	73,20	72,59	72,97	73,35	72,49	72,88	73,28
<b>4. TPAK (Persen)</b>	78,47	79,6	84,56	45,03	49,25	51,65	62,16	64,80	68,44
<b>5. TPT (Persen)</b>	10,2	7,92	7,76	7,98	8,58	6,94	9,41	8,17	7,45

Sumber : BPS Provinsi Banten



**ST 2023**

**SENSUS PERTANIAN**

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SERANG**

Jl. Raya Pandeglang Pal 4 Kelurahan  
Sukajaya Kecamatan Curug, Kota Serang

Telp. (0254) 200705

Website: <https://serangkota.bps.go.id>

Email: [bps3673@bps.go.id](mailto:bps3673@bps.go.id)